INGATAN SEJARAH KOLEKTIF WONG CILIK

TENTANG
PILPRES 2019

Imam Ghazali Said
Nyong Eka Teguh Iman Santosa
Achmad Zuhdi DH

INGATAN SEJARAH KOLEKTIF WONG CILIK TENTANG PILPRES 2019

Imam Ghazali Said
Nyong Eka Teguh Iman Santosa
Achmad Zuhdi DH

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

PASAL 113 KETENTUAN PIDANA
SANKSI PELANGGARAN

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

INGATAN SEJARAH KOLEKTIF WONG CILIK TENTANG PILPRES 2019

Imam Ghazali Said
Nyong Eka Teguh Iman Santosa
Achmad Zuhdi DH

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh Penerbit Pena Jaya Pers

ISBN: 978-623-09-5050-6
vii + 162 hal; 14,8 x 21 cm
Cetakan Pertama, Agustus 2023

Penulis	**: Imam Ghazali Said** **Nyong Eka Teguh Iman Santosa** **Achmad Zuhdi DH**
Editor	**: Ahmad Nabilul Maram**
Desain Sampul	**: Syamsul Arifin, S.Pd., M.Pd.**
Layouter	**: Ahmad Nabilul Maram**

Diterbitkan oleh:

Pena Jaya Pers

Perum IKIP C-92 Gunung Anyar - Surabaya

penajayapers@gmail.com

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil-'alamin. Ungkapan rasa syukur kehadirat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* ini kami panjatkan seiring dengan terselesaikannya penulisan buku ini yang merupakan hasil penelitian. Pelaksanaan riset sendiri dilaksanakan di tiga kabupaten/kota di Jawa Timur, yaitu Sidoarjo, Surabaya, dan Bangkalan. Studi lapangan terlaksana pada tahun 2023 dengan dukungan pendanaan kompetitif dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Tulisan ini mengambil dua fokus utama pembahasan yaitu tentang ingatan sejarah kolektif wong cilik tentang pemilu 2019 dan presedennya bagi pelaksanaan pemilu 2024. Data lapangan penelitian kemudian dielaborasi dengan bantuan hasil studi kepustakaan dan teori-teori yang relevan. Diharapkan bahwa temuan riset bisa memberi gambaran yang lebih utuh dan kontekstual terkait isu yang menjadi pokok diskusi di buku ini.

Sebagai bentuk publikasi dari hasil penelitian, buku ini tentu masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena ini,
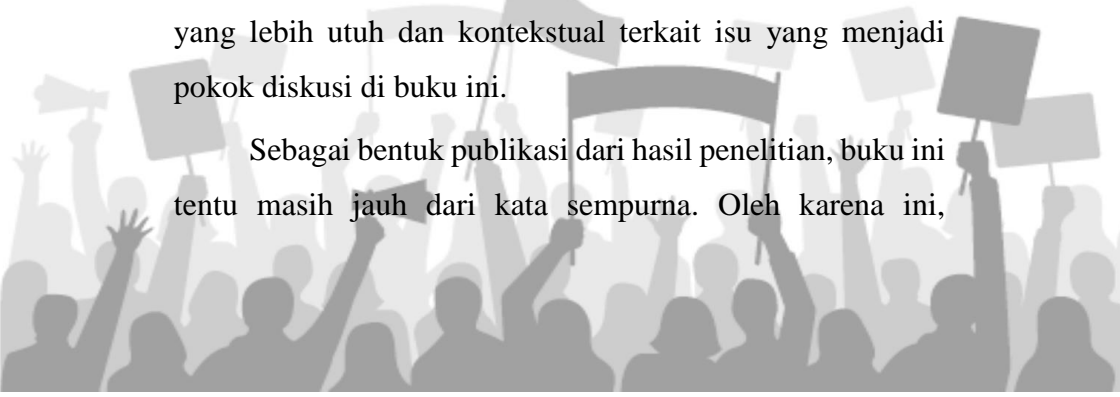
perbaikan dan penyempurnaan masih akan tetap dilakukan di masa mendatang. Sekalipun demikian, dengan segala kekurangannya, semoga apa yang tersaji dalam buku ini dapat bermanfaat terutama ikut berkontribusi dalam penguatan demokratisasi di Indonesia. Tak terkecuali, menempatkan wong cilik sebagai salah satu unsur sejarah yang tak boleh diabaikan apalagi dilupakan.

Selamat membaca.

Surabaya, 15 Agustus 2023

BAB 1
PENDAHULUAN

Di tengah proses menyambut kontestasi politik 2024 yang menghangat, terdapat isu strategis nasional yang masih membayangi perhelatannya. Yaitu ancaman menurunnya tingkat kepercayaan publik *(public distrust)* pada hasil penyelenggaraan pemilu serta signifikansinya bagi pengembangan demokrasi *(democratization)* yang lebih berkeadaban di Indonesia. Salah satu alasan aktual yang bisa dikemukakan adalah fenomena anomali yang muncul pasca Pilpres 2019 lalu. Kebiasaan yang terjadi, lawan politik yang kalah memilih untuk berada di luar kekuasaan. Kalaupun terbangun koalisi atau kerjasama politik, sebatas pada kelembagaan partai. Sementara kandidat yang bertarung tidak masuk dalam struktur kekuasaan. Tetapi yang terjadi dalam Pilpres 2019, pasangan kandidat yang kalah justru masuk dalam kabinet, menjadi menteri dari pasangan calon yang terpilih. Prabowo Subianto – Sandiaga Uno bergabung dengan koalisi pemerintah menjadi menteri,

pembantu Jokowi – Ma'ruf Amin. Dalam sejarah politik Indonesia moderen bahkan dunia, peristiwa ini merupakan catatan sejarah baru.

Berbagai pihak mengkritik langkah politik ini. Kekecewaan juga ditengarai muncul dari kalangan yang sebelumnya mendukung pasangan Prabowo-Uno. Beberapa alasan memang dikemukakan untuk membenarkan pilihan politik tersebut. Di antaranya keinginan untuk meredam kekhawatiran keterbelahan bangsa akibat praktik politik identitas yang masif selama proses kontestasi di 2019 (lihat Simandjuntak, 2022). Terlebih lagi, di tengah persoalan bangsa menghadapi pandemi Covid-19, maka persatuan dan kesatuan bangsa ini yang harus dikedepankan (Sari, 2022). Justifikasi ini tak membendung persepsi publik bahwa perhelatan politik di Indonesia tak jauh dari sekedar praktik bagi-bagi kekuasaan di lingkaran elit bangsa (lihat Sastramidjaja, Rasidi, dan Elsitra, 2022). Sementara itu, arena politik sebagai medan perjuangan yang mengusung agenda dan isu tawaran ideologis menjadi terkesan kian sumir di kalangan masyarakat

kebanyakan. Hal ini semakin dikuatkan dengan masih begitu kentalnya keputusan-keputusan politik nasional dengan akomodasi kepentingan-kepentingan elite (lihat Muhtadi, 2022a; 2022b).

Relevansi Diskursus Wong Cilik

Kekhawatiran terkait kepercayaan publik ini tentu disadari banyak pihak sebagai isu strategis yang harus disikapi dan direspons serius karena sangat mempengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia. Tetapi arus wacana yang berkembang melalui beragam saluran media publik justru seolah tidak memberi perhatian cukup pada isu ini. Wong cilik masih menjadi isu marginal dalam atmosfer percakapan publik (lihat Arifianto, 2022). Wacana prosedural justru yang tampak lebih mewarnai perbincangan tentang demokrasi seputar perhelatan pemilu serentak 2024 (Dinata dan Akbar, 2022; Wahdini, 2022; VOI, 2021; Amir, 2020).

Maka, mengkaji kontestasi politik nasional dari kacamata akar rumput sebenarnya merupakan suatu kebutuhan. Sudah saatnya pengembangan demokrasi di Indonesia memberi ruang bahkan mengarusutamakan

suara dan aspirasi wong cilik secara lebih otentik. Keberadaan mereka sudah seharusnya tidak lagi hanya sekedar diatasnamakan atau dikooptasi oleh para elite politik pada momentum kontestasi untuk mendapatkan dukungan suara (electoralgain). Aspirasi dan kepentingan wong cilik justru perlu dipastikan menjadi jantung bagi proses demokratisasi yang sedang berlangsung. Wong cilik pada konteks ini bisa dipahami secara lebih integratif dengan tidak melulu pada pengertian politis, tetapi juga menyentuh aspek sosiologis-kultural. Hal ini penting dan relevan secara historis karena wong cilik yang secara politik menempati posisi subordinat, secara sosiologis-kultural pada umumnya juga merupakan pihak yang masuk dalam kategori kelas sosial rendah dan ekonomi lemah.

Pada aras pemikiran semacam inilah tulisan ini hadir dengan menjadikan ingatan sejarah kolektif *(collective historical memory)* wong cilik sebagai jendela untuk melihat sebagian realitas praktik demokrasi di Indonesia saat ini. Melalui studi kepustakaan dan lapangan di tiga kabupaten/kota di Jawa Timur, yaitu

Sidoarjo, Surabaya, dan Bangkalan, ingatan sejarah kolektif wong cilik akan dieksplorasi untuk ditemukan polanya. Benarkah asumsi selama ini yang mengatakan bahwa bangsa Indonesia, utamanya kalangan rakyat kebanyakan, memiliki pola ingatan pendek dan mudah melupakan peristiwa yang di antaranya bahkan sangat strategis karena mempengaruhi hajat hidup mereka sehari-hari (lihat Kohar, 2021; Haba, 2011). Kondisi yang jika benar menjadikan bangsa ini rentan berkecenderungan stagnan dan lambat belajar untuk melakukan perbaikan dari berbagai kelemahan, kekurangan, dan kesalahan yang pernah dilakukan. Dan pihak yang kemudian paling merasakan dampaknya secara langsung adalah kelompok masyarakat marginal atau wong cilik. Lantas, mengingat masih minimnya kajian ilmiah terkait hal tersebut, penelitian ini menjadi sangat relevan dan signifikan untuk dilakukan karena unsur keaslian dan kebaruannya *(originality and novelty)*. Studi ini diharapkan akan bermanfaat *(benefit)* turut berkontribusi pada penguatan demokratisasi substansial serta peningkatan kepercayaan publik

terhadap proses konstitusional yang harus dilalui menuju realisasi cita-cita berbangsa dan bernegara.

Tulisan di buku ini akan fokus pada dua isu utama, yaitu tentang (1) bagaimana ingatan sejarah kolektif wong cilik tentang Pilpres 2019; dan (2) apa presedennya terhadap pemilu 2024. Adapun argumen yang mendasari studi ini dilakukan adalah bahwa wong cilik merupakan elemen demokratisasi Indonesia yang tidak boleh diabaikan atau dipinggirkan. Sebagai salah satu kategori penduduk dengan jumlah yang tidak sedikit di negeri ini, wong cilik harus mendapat ruang sekaligus afirmasi di ranah akademis dan juga praktis melalui *self-representation.* Wong cilik harus didengar secara langsung pendapatnya. Ingatannya sekaligus pemahamannya terkait proses politik yang strategis bagi hidup mereka harus dinilai dan diapresiasi. Selanjutnya dunia intelektual, patut menunjukkan keberpihakan serta kepeduliannya terkait hal ini. Wong cilik harus dipandang memiliki kemampuan serta kapasitas untuk berbicara tentang diri mereka sendiri.

Melalui kajian ini, sesuai fokus isu yang dibahas, pola ingatan sejarah kolektif wong cilik tentang Pilpres 2019 serta apa presedennya terhadap Pemilu 2024 dapat dipahami. Lebih dari ini, studi ini juga dimungkinkan dapat berguna dalam upaya dan proses evaluasi kebijakan sekaligus praktik berdemokrasi di ruang lingkup nasional melalui perspektif subaltern wong cilik. Pola pemahaman subaltern wong cilik tentang kebijakan sekaligus praktik berdemokrasi di ruang lingkup nasional serta analisis pokok-pokok persoalannya juga dapat terpahami secara lebih otentik. Puncaknya tentu tingkat kepercayaan publik terhadap proses dan hasil-hasil dari demokrasi konstitusional yang ada terus mengalami perbaikan.

Terkait dengan isu ingatan sejarah kolektif wong cilik dan kontestasi politik dalam bentuk pemilihan umum, baik Pilpres 2019 maupun pemilu 2024. Kajian seputar Pilpres 2019 lebih banyak menyoroti isu partisipasi politik *(political participation)* dan kampanye serta pemasaran politik *(political campaign and marketing).*

Terkait partisipasi politik di antaranya tulisan Haris dan Dardum (2021) tentang keterlibatan kiai NU Jember. Amelia et.al. (2020) tentang pilihan santri. Winarni, Agussalim, dan Bagir (2020) serta Kurnia dan Al-Hamdi (2019) tentang motif dukungan politik. Ristala (2019) tentang upaya meminimalisir konflik antar pendukung. Terkait kampanye dan pemasaran politik di antaranya Fermana dan Zetra (2022) serta Tinarbuko (2019) tentang media dan iklan politik Pilpres. Gautama (2020), Nasution, Harsono, dan Triono (2020), Kurniawan dan Susanto (2019) serta Najib dan Irsyad (2019) tentang persepsi, sentimen dan sikap kecenderungan pemilih. Fadiyah dan Simorangkir (2021), Sumarno (2021), Durrah, Anwar, dan Siregar (2020), Panuju (2019), dan Alvin (2019) tentang penggunaan media sosial dalam kampanye politik. Assidiq dan Ambarwati (2021) tentang strategi politik tim kampanye. Isu lain yang terangkat seputar Pilpres 2019 adalah terkait politik identitas dan tantangan terhadap demokrasi. Iswandi dan Abdullah (2020) serta Romli (2019) menyoroti hal ini. Sedangkan kajian

seputar dampak sosial-politik pasca Pilpres 2019 relatif masih terbatas. Di antaranya yang membahas hal ini adalah Indrawan, Ilmar, dan Kusuma (2022) tentang perlunya upaya rekonsiliasi politik pasca kontestasi yang menunjukkan potensi keterbelahan bangsa dan Hergianasari dan Netanyahu (2021) tentang transformasi gerakan radikal pasca Pilpres 2019.

Sementara isu mengenai ingatan sejarah kolektif wong cilik dengan konteks perpolitikan kontemporer Indonesia sejauh ini riset dan analisis tentang wong cilik kebanyakan menyorotinya dari aspek ekonomi seperti kemiskinan. Semisal Ganjar Nugroho (2001) menyoroti isu resistensi wong cilik atas pasar. Wong cilik bisa membangun kekuatan resistensi terhadap keadaan dan situasi yang timpang dan penuh kesenjangan. Salah satunya kondisi pasar (alokasi-konsumsi) yang menekan dan memaksa mereka untuk melakukan perlawanan. Bentuknya bisa melalui siasat pembelah dan penjualan yang memungkinkan wong cilik mendapatkan akses dengan harga yang lebih terjangkau. Dalam situasi tertentu yang sangat represif terhadap pemenuhan

kebutuhan dasar hidup mereka, wong cilik bisa terpantik untuk melakukan hal-hal yang secara hukum bisa dikategorikan melanggar atau bahkan melakukan amuk secara massal melalui penjarahan dan perusakan. Resistensi ini bisa bergerak secara tidak terorganisir, meski perubahan yang diraih mungkin tidak terlampau signifikan jika hal tersebut dilakukan secara sistemik. Topik ingatan sejarah kolektif sendiri sejauh ini juga masih belum memberi tempat secara spesifik pada peran wong cilik dalam sejarah. Beberapa riset yang terkait dengan ingatan sejarah kolektif tersebut semisal dilakukan Pangestu (2021) yang mengkaji novel dan Yambeyapdi (2019) yang mengkaji ingatan kolektif masyarakat Papua tentang integrasi.

Lanskap dirkursus tersebut tentu bisa dibaca sebagai ruang terbuka di mana pengarusutamaan isu wong cilik dalam wacana sejarah politik di Indonesia dan pengarusutamaan topik ingatan sejarah kolektif dalam studi ilmiah di tanah air masih sangat relevan untuk dilakukan.

Mendekati Wong Cilik

Data pokok dari tulisan ini diambil melalui pendekatan historis dengan modifikasi desain sebagai penggabungan sistematis secara metodologis (Dubois dan Gadde, 2002). Masalah dipelajari secara kualitatif dengan mengintegrasikan studi lapangan, studi literatur, dan pendekatan komparatif (lihat Creswell, 2014; Roth, 2012; Keegan, 2009). Melalui studi lapangan, realitas dan data aktual di lapangan empiris dari sumber data primer, yaitu wong cilik sebagai informan akan digali. Sedangkan studi tekstual dilakukan untuk elaborasi teoritik guna memberikan konteks lebih luas terhadap data yang ditemukan.

Lokus studi mengambil wong cilik di tiga kota/kabupaten di Jawa Timur, yaitu Surabaya, Sidoarjo, dan Bangkalan. Melalui ketiga daerah tersebut, isu strategis nasional terkait demokratisasi secara konstitusional dan tingkat kepercayaan publik terhadapnya akan dibaca. Pemilihan ketiga kota/kabupaten ini didasari pertimbangan karakteristik politik masyarakatnya yang berbeda ditinjau dari sejarah

dan hasil pemilihan umum selama reformasi. Surabaya dikenal sebagai kota dengan basis politik yang kental nasionalis-sekuler. Bisa dikatakan, kota ini merupakan kendang alami bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang hampir selalu menjadi pemenang di tempat ini. Sidoarjo, berbeda dari Surabaya, dikenal sebagai kabupaten santri dengan corak kultur tradisional, di mana Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) senantiasa menorehkan keunggulan elektoral di sini. Sedangkan Bangkalan, dari beberapa kali pemilu, menunjukkan fenomena yang lebih cair. Meski secara lokasi bersebelahan dengan Surabaya yang berhimpit dengan Sidoarjo, tetapi hasil pemilu di kabupaten ini tidak secara konstan dimenangkan oleh partai tertentu. Dengan karakter pemilih politik yang berbeda ini, ingatan sejarah kolektif wong cilik di ketiga daerah tersebut dapat menjadi lensa yang dipergunakan untuk membaca realitas lebih luas di tingkat nasional.

Dalam praktiknya, teknik komparasi data juga dilakukan untuk bisa menemukan pola ingatan sejarah kolektif wong cilik, yakni data yang dipanen dari tiga

daerah yang berbeda: Surabaya, Sidoarjo, dan Bangkalan. Dalam analisisnya, teori dan perspektif yang relevan akan dipergunakan. Di antaranya adalah perspektif keadilan sosial *(social justice)* (lihat Joshi, 2020). Pembahasan ini tidak hanya sekedar menarasikan secara deskriptif atas hasil-hasil penelitian, tetapi lebih jauh memberikan pemaknaan atas temuan secara elaboratif.

Dimulai dari upaya menunjukkan relevansi diskursus wong cilik saat ini. Kemudian mengeksplorasi konsepsi tentang wong cilik dan korelasinya dengan politik, terutama pada aspek agensi dan aspirasi. Paparan selanjutnya lebih menukik pada hasil studi lapangan di tiga kabupaten/kota yang telah dilakukan. Melalui urutan ini, pembaca akan dapat membaca realitas ingatan sejarah kolektif wong cilik tentang Pilpres 2019 secara lebih utuh. Hasil pertama, yakni bagaimana ingatan sejarah kolektif wong cilik tentang Pilpres 2019. Termasuk di dalamnya isu perkawinan politik antar dua pasangan kandidat yang semula menjadi rival dalam kontestasi. Ramifikasi persoalan-persoalan lainnya yang terkait juga coba didekati.

Melalui analisis, sintesis, dan komparasi dari data di tiga daerah penelitian: Surabaya, Sidoarjo, dan Bangkalan, pembahasan menilik aspek-aspek distingsi sekaligus similaritas atau kekhasan yang bisa dijadikan sebagai indikator untuk membangun pemahaman tentang adanya pola dari ingatan sejarah kolektif wong cilik tentang piplres 2019.

Hasil kedua, terkait preseden dari ingatan kolektif wong cilik tentang Pilpres 2019 tersebut bagi pemilu 2024. Pada tahapan ini, benang merah dari pola ingatan sejarah kolektif wong cilik akan didialogkan secara proyektif dengan kemungkinan-kemungkinan yang bisa timbul baik dalam bentuk persepsi, pemahaman, sikap, partisipasi, maupun pilihan politik wong cilik dalam kontestasi yang akan datang. Dari perjumpaan konseptual sekaligus praktikal itu diharapkan akan dapat ditarik pemahaman lebih kritis serta utuh apakah ingatan sejarah kolektif wong cilik mengambil bentuk pemutusan atau pematahan *(disjunture)* ataukah bentuk berkesinambungan *(continuity)* (lihat Schwartz, 2018; Nurse, 2018).

Tulisan ini akan ditutup dengan simpulan yang memberi titik tekan pada urgensitas, relevansi, serta signifikansi diskursus wong cilik dan kontribusinya bagi penguatan demokratisasi konstitusional di Indonesia.

BAB 2
KONSEPSI TENTANG WONG CILIK

Terdapat dua konsep kunci yang secara teoritik menafasi tulisan ini, yaitu konsep tentang ingatan sejarah kolektif dan konsep mengenai wong cilik. Selain itu, setidaknya terdapat dua teori utama yang menginspirasi pewacanaan wong cilik oleh para penulis, yaitu teori wacana dari Michel Foucoult dan teori subaltern dari Gayatri Spivak. Dari Foucoult (1995) diketahui bahwa relasi kuasa dalam masyarakat di mana wacana yang tidak dominan pada gilirannya akan terpinggirkan *(marginalized)* atau bahkan terpendam *(submerged).* Ini bisa dioperasikan untuk kasus isu wong cilik yang terpinggirkan dalam wacana kontestasi politik di Indonesia. Adapun dari Spivak (2010), diketahui bahwa dalam relasi yang bersifat asimetris, kelompok subaltern/subordinat/marjinal/wong cilik perlu dipahami memiliki kapasitas untuk melakukan resistensi termasuk representasi diri sendiri *(self representation)* untuk menyuarakan kepentingan-kepentingannya
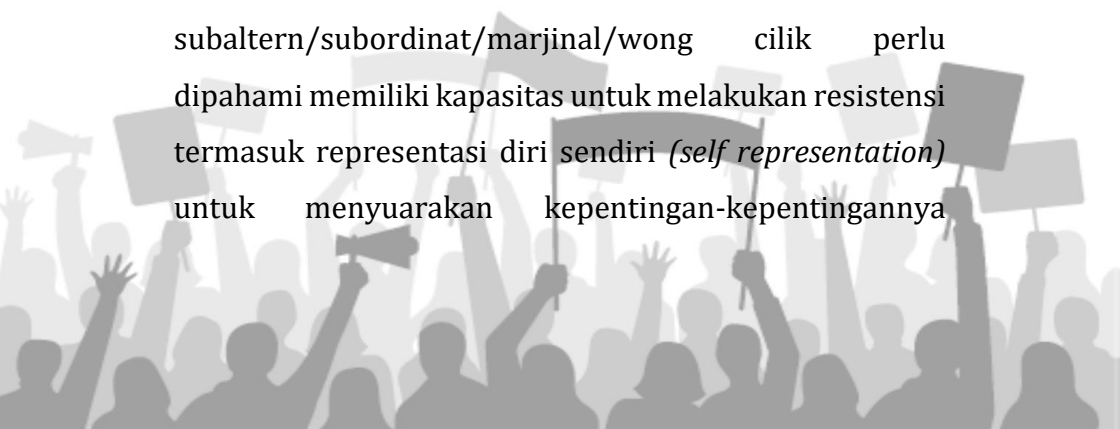
sebagai subyek sejarah. Di bagian ini akan diulas terlebih dahulu konsepsi tentang wong cilik karena konsep inilah basis yang mendasari segala perbincangan dalam kajian ini.

Mendefinisikan Wong Cilik

Term '*wong cilik'* sebenarnya merupakan istilah dari bahasa Jawa yang berarti 'orang kecil' atau menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diartikan 'rakyat jelata' (Kemendikbud, 2017). Wong cilik dalam diskursus ilmiah juga akrab diasosiasikan serta dikonsepsikan sebagai kelompok masyarakat subaltern. Ini merujuk pada gagasan yang berkembang dalam diskusi poskolonial tentang suatu posisi yang tidak sepenuhnya didefinisikan sebagai yang liyan, melawan, atau alternatif bagi kekuatan dominan. Relasi kuasa yang terbangun bersifat asimetris dan timpang (Ayoob, 2002). Menempatkan subaltern sebagai posisi ambigu dari marjinalitas (Sharp, 2011; Hooks, 1990). Diskusi lebih luas juga menjadikan subaltern sebagai gagasan yang lekat dengan proyek global dari kapitalisme dan imperialisme baik pada level mikro personal

sebagaimana dijumpai melalui Michel Foucoult maupun pada level makro melalui karya Gayatri Chakravorty Spivak maupun Edward W. Said (Maggio, 2007; Spivak, 2010; Foucoult, 1995; Said, 1979).

Dalam sejarah politik di Indonesia, istilah wong cilik sering ditautkan dengan gagasan Sukarno tentang Marhaenisme. Di mana beliau mengenalkan adanya kaum marhaen yang dikonsepsikan sebagai kaum papa, orang miskin, rakyat kecil yang tertindas di bawah sistem kekuasaan kolonial. Berbeda dari asosiasi propagandis Partai Komunis Indonesia (PKI) yang melekatkan wong cilik dengan kaum proletar atau kaum buruh, maka ide kaum marhaen tak melulu mengartikan wong cilik sebagai kelompok masyarakat miskin yang menjual tenaganya (Kuswono, 2016). Sejarah juga mencatat bahwa dengan keterbatasannya sebagai bukan elit, rakyat kebanyakan *(grassroot)* atau wong cilik juga dapat mengambil peran dalam partisipasi politik untuk melakukan perubahan baik melalui cara kooperatif maupun pergolakan radikal (Adnan, 2014).

Ringkasnya, wong cilik selalu identik dengan kelompok masyarakat yang berada dalam kategori miskin. Dalam tradisi Islam, kemiskinan ini tidak harus diartikan orang harus menjadi peminta-minta, tetapi dikonsepsikan sebagai pihak yang belum mendapatkan kepedulian dan perhatian dari orang kaya untuk membantu memenuhi kebutuhannya. Karena kekayaan di sini dikonsepsikan sebagai entitas yang harus terdistribusikan ke pihak-pihak yang membutuhkan. Tidak boleh terakumulasi secara ekstrim pada kelompok kecil orang (Mughni, 2015). Jika merujuk BPS (2022), maka yang bisa disebut sebagai wong cilik adalah mereka yang pendapatan per kapita per bulannya kurang atau sama dengan Rp 505.469. Posisi dan kondisi subaltern ini menjadikan wong cilik rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan sistemik yang meminggirkan, mengabaikan, serta membungkam suara aspirasi serta kepentingan mereka (Kaligis, 2014). Wong cilik bisa menjadi sangat seksi secara politik pada momentum kontestasi untuk tujuan kapitalisasi elektoral, tetapi kemudian bisa ditinggal dan terlupakan ketika perhelatan politik usai.

Memahami wong cilik sebagai konsep yang diperhitungkan dalam sejarah politik ini tampaknya perlu disandingkan dengan beberapa konsep lainnya yang memiliki kedekatan pemaknaan. Beberapa konsep yang akrab disepadankan dengan terma wong cilik dalam konteks politik di antaranya adalah kaum marjinal, hoi polloi, plebeian, proletar, pekerja kerah biru, marhaen, dan buruh tani.

Kaum Marjinal

Mendefinisikan siapa yang dimaksud kaum marginal ini mungkin problematik. Karena konsepsi di tiap negara bisa jadi akan berbeda-beda. Tetapi jika ditarik garis besarnya, istilah ini umumnya mengacu pada individu atau kelompok yang ada di pinggiran atau periferal masyarakat arus utama dan mungkin mengalami berbagai bentuk pengucilan dan ketidakberuntungan, atau diskriminasi. Misal, dari aspek pendidikan, *"The marginalized typically demonstrate lower levels of educational achievement."* Kaum marjinal biasanya menunjukkan tingkat pencapaian pendidikan

yang rendah (UNESCO, 2010). Dan term ini dikenal populer dan bisa dibaca dari berbagai perspektif.

Secara filosofis, konsep kaum marjinal menimbulkan pertanyaan tentang keadilan, kesetaraan, dan sifat struktur masyarakat. Filsuf dapat mempertimbangkan implikasi etis dari marginalisasi dan bagaimana kaitannya dengan konsep yang lebih luas seperti hak asasi manusia, keadilan distributif, dan teori kontrak sosial. Mereka mungkin mengeksplorasi apakah masyarakat memiliki kewajiban moral untuk mengangkat dan mendukung mereka yang terpinggirkan, dan bagaimana isu-isu ini terkait dengan gagasan kebebasan individu dan tanggung jawab sosial. Sekalipun terkait kewajiban moral *(moral obligation)* untuk membantu mereka yang lemah tetap merupakan isu yang tidak sepenuhnya disepakati secara universal (Privitt, 2019). *"Some ethicists argue that rich nations have no obligation to aid poor nations. Our moral duty, they claim, is always to act in ways that will maximize human happiness and minimize human suffering. In the long run, aiding poor nations will produce far more*

suffering than it will alleviate" (Andre & Velasquez, 2015). Sebagian masih berpendapat bahwa mereka yang mampu tidak memiliki kewajiban untuk membantu yang miskin. Kewajiban moral kita, menurut mereka, adalah selalu bertindak dengan cara yang akan memaksimalkan kebahagiaan manusia dan meminimalkan penderitaan manusia. Dalam jangka panjang, membantu mereka-mereka yang miskin akan menghasilkan lebih banyak penderitaan daripada meringankannya.

Dari perspektif sosial, kaum marginal adalah mereka yang sering terpinggirkan karena faktor-faktor seperti ras, etnis, jenis kelamin, status sosial ekonomi, kecacatan, atau karakteristik lainnya. Marginalisasi secara sosial ini dapat mengakibatkan akses yang tidak setara terhadap sumber daya, kesempatan, dan keterwakilan. Maka, memahami dinamika marginalisasi sangat penting untuk mengatasi ketidakadilan sosial dan mendorong kearah masyarakat inklusif. Perluasan akomodasi terhadap keragaman bisa menjadi pintu yang menuntun pada realisasinya. *"The inclusion of multiple worldviews is essential to an inclusive participatory*

process, which in turn helps secure the social justice [...] (Manzo, 2011)*.”*

Adapun marginalisasi budaya bisa dipahami berkaitan dengan individu atau kelompok yang identitas, praktik, atau kepercayaan budayanya tidak sepenuhnya diakui atau dihargai oleh budaya dominan. Hal ini dapat menyebabkan perasaan terasing, kehilangan warisan, dan ekspresi budaya yang terbatas. Di sini, kajian budaya biasanya akan memeriksa bagaimana budaya yang terpinggirkan itu mampu menolak atau beradaptasi dengan pengaruh dominan, bagaimana perampasan budaya terjadi, dan bagaimana keragaman budaya berkontribusi pada kekayaan pengalaman manusia. Ini mendeskripsikan apa yang diistilahkan sebagai ‘peminggiran’ *(pheripheralizing).* Tetapi dari perspektif yang agak berbeda, maka marginalitas budaya bisa mengambil bentuk sebagai, *“situations and feelings of passive betweeness when people exist between two different cultures and do not yet perceive themselves as centrally belonging to either one.”* Situasi dan perasaan keantaraan pasif ketika orang-orang berada di antara

dua budaya yang berbeda dan belum menganggap diri mereka sebagai bagian dari salah satunya. Situasi ini mempertemukan dua konsep sekaligus, yaitu akulturasi dan stres akulturatif (Choi, 2001).

Sementara secara politis, kelompok-kelompok yang terpinggirkan sering kali memiliki keterwakilan, suara, dan pengaruh yang terbatas dalam proses pengambilan keputusan. Perjuangan politik mereka yang terpinggirkan dan tertindas menjadi terpahami bisa sangat bergantung pada oposisi dan perlawanan. Marginalisasi mereka menentukan identitas mereka, dan politik yang diperjuangkan diharapkan dapat menghasilkan inklusi dan kesetaraan. *"The identity politics of marginalised and oppressed peoples rely heavily on opposition and resistance. Their marginalisation defines their identity, and the politics that result in stress inclusion and equality"* (Oza, 2021). Studi tentang marjinalisasi politik mencakup topik-topik seperti penindasan pemilih, persekongkolan, dan akses yang tidak setara ke kekuasaan politik. Ahli teori politik menganalisis dampak dari dinamika ini pada

pemerintahan demokratis dan mengadvokasi langkah-langkah untuk memastikan partisipasi politik yang setara bagi semua warga negara.

Penting untuk dicatat bahwa konsep orang marginal memiliki banyak segi dan bersinggungan dengan berbagai aspek pengalaman manusia. Diskusi tentang topik ini dapat mencakup isu-isu seperti identitas, diskriminasi, ketidaksetaraan, keadilan sosial, dan banyak lagi. Memahami dan mengatasi tantangan yang dihadapi oleh individu dan kelompok yang terpinggirkan memerlukan pendekatan interdisipliner yang mempertimbangkan faktor struktural dan individu yang berkontribusi terhadap marginalisasi mereka.

Gerakan politik dari kelompok-kelompok yang terpinggirkan fokus pada advokasi untuk hak, representasi, dan perbaikan individu atau komunitas yang secara historis dirugikan, dikecualikan, atau didiskriminasi. Gerakan-gerakan ini bertujuan untuk mengatasi ketidaksetaraan sosial, menantang penindasan sistemik, dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Berikut beberapa contoh gerakan

politik yang melibatkan kelompok marginal dan bisa menjadi penjelas betapa konsep ini begitu penting untuk dipahami.

Pertama, Gerakan Hak-Hak Sipil di Amerika Serikat. Gerakan ini berusaha untuk mengakhiri segregasi rasial dan mengamankan persamaan hak bagi orang Afrika-Amerika. Tokoh kunci seperti Martin Luther King Jr. dan organisasi seperti *National Association for the Advancement of Colored People* (NAACP) memainkan peran penting dalam perjuangan ini. Pertalian antara duanya bisa dibaca melalui simpulan Watson (1993) berikut ini:

> King succeeded in arousing the national conscience in a manner that no other African-American leader had done, but it was the NAACP, serving as a powerful legal instrument and political machine, that achieved the basic constitutional reforms that were required to accord full citizenship to African Americans. Both the NAACP's humanitarian and constitutional philosophy and King's nonviolent methods were essential to achieving civil rights reform in the 1950s and 1960s.

Kedua, Gerakan Feminis. Gerakan ini mengadvokasi kesetaraan gender dan menantang norma

patriarkal (Mansoor, 2015). Ini telah berkembang dari waktu ke waktu untuk mengatasi masalah interseksionalitas, yang mencakup perjuangan untuk hak LGBTQ+, hak reproduksi, dan banyak lagi. Gerakan hak LGBTQ+ sendiri bertujuan untuk menjamin persamaan hak, penerimaan, dan perlindungan bagi individu terlepas dari orientasi seksual atau identitas gender mereka. Ini telah menyebabkan perubahan signifikan dalam sikap sosial dan pengakuan hukum di sebagian negara. Sekalipun hingga detik ini, isu tersebut masih sangat sensitif dan kuat penolakan terhadapnya di banyak negara. Tak terkecuali Indonesia (Knight, 2018).

Ketiga, Gerakan Hak Disabilitas. Gerakan hak-hak disabilitas adalah gerakan sosial yang mulai berkembang pada akhir 1960-an, pada puncak gerakan hak-hak sipil. Gerakan ini mengadvokasi hak dan inklusi penyandang disabilitas. Ini memperjuangkan hak hukum dan kebebasan sipil penyandang disabilitas dan akhir dari stigmatisasi sosial terhadap identitas penyandang disabilitas. Targetnya, ingin menghilangkan hambatan fisik dan sosial dan memastikan akses yang sama di

wilayah publik. Manifestasinya bisa dalam bentuk memperoleh dan mempertahankan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas; mengizinkan penyandang disabilitas untuk menggunakan haknya sebagai individu yang mandiri; dan mengakhiri diskriminasi sosial dan stigmatisasi terhadap penyandang disabilitas (Petronis, 2023). Dalam perkembangannya, gerakan ini telah berhasil mendapatkan perhatian tidak hanya pemerintah, tetapi juga dukungan dari publik (Scotch, 1989).

Keempat, Gerakan Hak Adat: Masyarakat adat di seluruh dunia telah berorganisasi untuk melindungi tanah, budaya, dan hak mereka. Fokus advoksainya berbeda-beda di setiap wilayah, tetapi sering membahas masalah seperti kedaulatan tanah, pelestarian budaya, dan perwakilan politik. Keragaman umumnya dipengaruhi oleh perbedaan pendekatan atau strategi politik, bahkan karena perbedaan di antara para pemimpin mereka.

> Whatever their need to project and promote essentialist images of themselves, indigenous peoples,

> like peoples everywhere, are differentiated by gender, generation, education, religion, class, and a variety of other factors. These social differences may also reflect political differences in approach and strategy to the question of indigenous identities and rights and even be institutionalized in competing political factions, parties, or organizations. The question, therefore, is whose interests do we choose to represent? With which faction or organization do we choose to collaborate? To whom are we accountable? (Hodgson, 2002).

Kelima, Gerakan Dalit. Gerakan ini mengadvokasi hak dan martabat komunitas Dalit India, yang secara historis dianggap tak tersentuh. Mereka berusaha untuk menantang diskriminasi berbasis kasta dan mempromosikan kesetaraan sosial. Sebagaimana digaungkan oleh para aktivis perjuangan hak Dalit: *"Dalit rights activists strive for the promotion and realization of Dalits' civil, political, economic, social and cultural rights. The range of human rights violation they suffer is appalling."* Mereka berjuang untuk promosi dan realisasi hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya Dalit. Kisaran pelanggaran hak asasi manusia yang mereka derita sudah sangatlah mengerikan (Swadhikar, 2015).

Keenam, Gerakan Hak Migran dan Pengungsi. Gerakan ini mengadvokasi hak dan perlakuan manusiawi terhadap migran, pengungsi, dan orang terlantar, mengatasi masalah seperti kebijakan imigrasi dan kontrol perbatasan. Gerakan hak-hak migran dan pengungsi ini muncul dalam berbagai bentuk dan menggunakan beragam taktik untuk disesuaikan dengan konteks dan keadaan khusus mereka. Tetapi yang diketemukan dalam berbagai studi, bahwa perlakuan dengan kekerasan bahkan tidak manusia kerap dialami oleh pengungsi dan para migran. Bahkan, ini disebut sebagai suatu fenomena global, *"the crackdown on refugees and migrants – and the resistances to these assaults – are a global phenomenon"* (Lowry & Nyers, 2003).

Ketujuh, Gerakan *Black Lives Matter*. Gerakan ini muncul mulanya sebagai tanggapan terhadap diskriminasi rasial dan kekerasan polisi. Gerakan ini berfokus pada mengakhiri rasisme sistemik, menangani kebrutalan polisi, dan mempromosikan keadilan sosial di negeri Amerika Serikat. Tetapi kemudian berkembang di

tingkat global (Célestine, 2022). Sesuai deskripsi resmi di lamannya, BLM didirikan pada 2013 sebagai tanggapan atas pembebasan pembunuh Trayvon Martin. Lalu mewujud menjadi organisasi berbentuk yayasan, BLM merupakan organisasi global di AS, Inggris, dan Kanada, yang misinya adalah memberantas supremasi kulit putih dan membangun kekuatan lokal untuk campur tangan dalam kekerasan yang dilakukan terhadap komunitas kulit hitam oleh negara dan warga. Dengan memerangi dan melawan tindakan kekerasan, menciptakan ruang bagi imajinasi dan inovasi orang kulit hitam, dan memusatkan kegembiraan orang kulit hitam, perbaikan langsung dalam hidup diharapkan bisa dimenangkan. BLM mengidentifikasi dirinya sebagai entitas yang ekspansif. Mereka mengorganisir para aktivis yang percaya pada gerakan yang inklusif dan luas. Bergerak melampaui nasionalisme sempit yang terlalu lazim di komunitas kulit hitam. Mereka juga menyatakan dukungan kepada perjuangan kelompok-kelompok minoritas dalam komunitas kulit hitam seperti kaum queer dan trans, disabilitas, orang tanpa dokumen

identitas, dan perempuan. BLM memusatkan aktivitasnya pada mereka yang terpinggirkan dalam gerakan pembebasan kulit hitam (BLM, 2023).

Contoh-contoh tersebut di atas menunjukkan keragaman kelompok terpinggirkan dan tantangan unik mereka. Gerakan politik dari kelompok yang terpinggirkan memainkan peran penting dalam menantang norma masyarakat, memengaruhi perubahan kebijakan, dan berkontribusi pada evolusi masyarakat yang lebih inklusif dan adil.

Hoi Polloi

Hoi polloi adalah frasa Yunani yang bisa diterjemahkan menjadi "banyak" atau "massa." Di mana *"hoi"* berarti "yang" dan *"polloi"* berarti "banyak" atau "orang". Frasa ini diketemukan dalam struktur masyarakat ideal yang dimimpikan Plato. Selain *hoi polloi*, ada juga *hoi epikouroi* dan *hoi phylakes*. Hoi epikouroi merujuk pada kelompok sosial yang merepresentasikan kelas administratif, militer, dan pengaturan ketertiban umum. Sedangkan hoi phylakes

adalah kelas penjaga, kelas penguasa (Owens, 1996). Dalam bahasa Yunani, itu digunakan untuk merujuk pada populasi umum tanpa harus memiliki konotasi negatif. Namun, dalam bahasa Inggris, istilah ini mengacu pada orang biasa dengan cara yang terkadang meremehkan kepentingan atau kecerdasan mereka. Ungkapan tersebut mengandung konotasi individu biasa yang bukan bagian dari elit atau kelas istimewa. Konsep ini dapat digunakan untuk menekankan kontras antara massa dan mereka yang memegang posisi kekuasaan, pengaruh, atau hak istimewa. Sehingga pengertiannya menjadi netral dan sedikit negatif akan sangat tergantung pada konteks dan nada penggunaannya. Istilah ini bisa saja momot mentalitas perseteruan yang kemudian dapat berkontribusi pada rasa segregasi sosial atau perbedaan kelas.

Perlu dicatat bahwa frasa itu sendiri biasanya tidak terkait dengan gerakan politik. Namun, jika kita mempertimbangkan gagasan gerakan politik yang bertujuan untuk mewakili dan menangani keprihatinan masyarakat luas, termasuk mereka yang mungkin

dianggap hoi polloi, kita dapat membahas gerakan yang mengadvokasi hak dan kepentingan warga negara biasa atau masyarakat banyak. Walhasil, gerakan semacam ini kerap mengemuka sebagai gerakan yang bersifat populis. Yaitu gerakan politik yang mengaku mewakili kepentingan dan kepedulian rakyat biasa. Populisme sering muncul sebagai tanggapan atas anggapan elitisme, korupsi, dan ketidaksetaraan dalam sistem politik yang mapan. Gerakan-gerakan ini biasanya membingkai diri mereka sebagai pejuang rakyat jelata melawan elit yang mengakar (lihat Roth, 2017).

Karakteristik umum dari gerakan populis ini antara lain ditunjukkan melalui sikapnya yang terkesan anti kemapanan. Mengkritik elit politik dan institusi sebagai terputus dari keprihatinan warga negara sehari-hari. Pemimpin populis sering menggunakan daya tarik emosional, narasi sederhana, dan retorika yang kuat untuk terhubung dengan massa dan menggalang dukungan. Beberapa gerakan populis menekankan nasionalisme dan identitas budaya, menegaskan pentingnya melestarikan nilai-nilai tradisional dan

melindungi kepentingan penduduk asli. Dalam gerakannya, gerakan populis mungkin juga mengadvokasi bentuk demokrasi yang lebih langsung, seperti referendum atau inisiatif warga negara, untuk memberikan hoi polloi peran yang lebih langsung dalam pengambilan keputusan. Termasuk di dalamnya, dalam usaha menekankan kebijakan ekonomi yang menguntungkan kelas pekerja, seperti peningkatan pengeluaran sosial, tindakan perdagangan proteksionis, atau redistribusi kekayaan (lihat Postel, 2022).

Beberapa contoh gerakan populis yang sempat menjadi perbincangan publik di antaranya: (1) Kampanye Brexit (Britania Raya). Gerakan yang diinisiasi untuk mengkampanyekan tuntutan keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa (Brexit). Faktor pendorongnya adalah sentimen populis, termasuk seruan untuk mendapatkan kembali kedaulatan nasional dan mengatasi kekhawatiran tentang imigrasi (lihat Marshall & Drieschova, 2018); (2) Gerakan Bintang Lima (Italia). Gerakan ini memposisikan dirinya sebagai gerakan rakyat biasa melawan partai politik tradisional.

Popularitasnya melejit dengan menjanjikan demokrasi yang lebih langsung dan mengatasi ketidaksetaraan ekonomi (lihat Passarelli & Tuorto, 2016); (3) Podemos (Spanyol). Merujuk pada sebuah partai politik sayap kiri yang menjadi terkenal karena menentang langkah-langkah penghematan dan mengadvokasi kebijakan ekonomi yang lebih inklusif (lihat Sinkkonen, 2015); (4) Revoluasi Bolivarian (Venezuela). Menjadi salah satu bentuk dari pergerakan di Amerika Latin yang mengambil pendekatan populis dengan memadukan tuntutan kebijakan ekonomi yang lebih memihak rakyat banyak dengan retorika anti-elitnya (lihat Ramírez, 2005); dan (5) Protes Rompi Kuning (Prancis). Gerakan ini dipicu oleh penentangan terhadap kenaikan harga bahan bakar, tetapi kemudian berkembang menjadi gerakan yang lebih luas yang menyoroti kesenjangan ekonomi dan ketidakpuasan terhadap pendirian politik (lihat Bynum et.al., 2021).

Sementara gerakan-gerakan ini dapat memperoleh dukungan rakyat yang signifikan, mereka sering menimbulkan perdebatan tentang dampak jangka

panjangnya terhadap pemerintahan, lembaga demokrasi, dan kohesi sosial. Gerakan populis dapat sangat bervariasi dalam ideologi dan strategi mereka, tetapi sering kali berasal dari keinginan untuk mengatasi ketidakadilan yang dirasakan dan menyuarakan keprihatinan hoi polloi.

Plebeian

Sebutan *plebeian* mengacu pada kelas sosial di Roma kuno yang mencakup orang-orang biasa yang berbeda dari kelas aristokrat atau ningrat. Plebeian adalah mayoritas penduduk Romawi dan memainkan peran penting dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi Republik Romawi dan kemudian Kekaisaran Romawi. Plebeian ini biasanya terdiri dari para petani, buruh, pengrajin, dan pedagang kecil. Mereka merupakan segmen kelas pekerja masyarakat Romawi dan sering tinggal di kota Roma atau pinggirannya. Berbeda dengan bangsawan, yang berasal dari keluarga kaya dan bergengsi, Plebeian atau 'orang kampung' ini umumnya tidak memiliki tingkat kekayaan yang sama dan status sosial yang diwarisi.

Salah satu aspek terpenting dari sejarah plebeian adalah perjuangan mereka untuk kesetaraan politik dan perwakilan di dalam negara Romawi. Pada awalnya, plebeian dikecualikan dari banyak jabatan politik dan memiliki hak yang terbatas dibandingkan dengan bangsawan. Mereka mencari representasi dan perlindungan yang lebih besar terhadap keputusan sewenang-wenang oleh kelas ningrat yang berkuasa. Perjuangan ini berujung pada berbagai konflik dan perkembangan politik, termasuk berdirinya *"Tribunes of the Plebs".* Tribun ini adalah sekumpulan pejabat yang dipilih secara eksklusif oleh kaum plebeian dan bertugas membela hak dan kepentingan kelas mereka. Seiring waktu, kaum plebeian berhasil mengamankan reformasi politik yang penting, seperti kemampuan untuk mengesahkan undang-undang (dikenal sebagai plebisit) yang berlaku untuk seluruh penduduk Romawi (lihat Smith, 2012).

Perjuangan sosial dan politik plebeian tak urung memantik serangkaian konflik antara mereka dengan kaum bangsawan yang berlangsung selama beberapa

abad. Ini menghasilkan perluasan bertahap hak dan kekuasaan plebeian di dalam negara Romawi. Melalui konflik-konflik ini, mereka berhasil mendapatkan konsesi utama, termasuk akses ke jabatan tinggi dan kemampuan untuk menikah dengan bangsawan. Perjuangan mereka untuk kesetaraan memiliki dampak yang bertahan lama pada masyarakat dan politik Romawi. Ketika pengaruh mereka tumbuh, perbedaan antara kaum patrician dan plebeian menjadi kurang kaku, dan mobilitas sosial menjadi meningkat. Evolusi ini berperan dalam pergeseran bertahap dari Republik Romawi ke Kekaisaran Romawi.

Warisan kaum plebeian dapat dilihat dalam konteks sejarah yang lebih luas dari perjuangan sosial untuk hak dan representasi. Upaya mereka membuka jalan bagi sistem politik yang lebih inklusif dan berkontribusi pada pengembangan pemerintahan perwakilan. Perjuangan mereka untuk kesetaraan berfungsi sebagai contoh sejarah tentang bagaimana kelompok yang terpinggirkan dapat mengatur dan mengorganisir diri untuk menantang hierarki dan

institusi sosial yang tidak adil. Singkatnya, plebeian adalah kelas sosial yang signifikan di Roma kuno, yang dicirikan oleh asal usul mereka yang sama dan perjuangan untuk hak politik dan perwakilan. Upaya mereka membantu membentuk lintasan masyarakat Romawi dan meletakkan dasar bagi pengembangan sistem politik yang lebih inklusif.

Pada era modern, gerakan yang menonjolkan distingsi antara kelas aristokrat atau ningrat dengan kelas rayat jelata mungkin sudah tidak umum lagi digunakan. Tetapi dengan konteks yang lebih luas, gerakan kaum plebeian dapat ditarik kesejajarannya dengan gerakan politik secara lebih luas mencakup gerakan yang melibatkan kelompok kelas pekerja atau terpinggirkan yang mencari representasi, hak, dan kesetaraan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Jadi, gerakan kaum plebeian bisa hadir melalui representasi gerakan yang mengadvokasi partisipasi yang lebih besar dan kekuatan pengambilan keputusan bagi mereka yang secara historis terpinggirkan atau dikucilkan dari proses politik. Misalnya, gerakan yang menuntut pengentasan

kesenjangan sosial ekonomi, mengadvokasi upah yang adil, kondisi kerja yang lebih baik, akses ke pendidikan, perawatan kesehatan, dan layanan sosial. Mereka bertujuan untuk menantang ketidaksetaraan sistemik yang melanggengkan kerugian yang dihadapi oleh kelompok 'plebeian'.

Serupa dengan perjuangan yang dihadapi kaum plebeian di Roma kuno, gerakan modern sering kali berfokus pada hak buruh dan kemampuan berorganisasi. Mereka mungkin melibatkan serikat pekerja, asosiasi pekerja, dan kampanye untuk meningkatkan kondisi kerja, melindungi hak-hak pekerja, dan memastikan perlakuan yang adil. Contohnya gerakan *Fight for 15* yang mengadvokasi upah minimum yang lebih tinggi dan kampanye untuk perlakuan yang lebih baik terhadap pekerja. Intinya, gerakan semacam ini senantiasa muncul dalam bentuk protes terhadap anggapan ketidakadilan, penindasan, atau eksploitasi. Mereka mungkin menangani masalah elitism dan korupsi, juga isu-isu kekuasaan represif seperti kebrutalan polisi,

diskriminasi rasial, ketidaksetaraan gender, dan bentuk bias sistemik lainnya (lihat Rolf, 2016; Brown, 2017).

Proletar

Konsep lainnya yang lekat dengan istilah wong cilik adalah kaum proletar. Kata ini mengacu pada kelas sosial dalam masyarakat kapitalis, yang secara historis ditandai dengan tidak memiliki alat produksi dan harus menjual tenaga mereka untuk ditukar dengan upah. Konsep proletariat menjadi terkenal melalui tulisan-tulisan Karl Marx dan Friedrich Engels (1969), yang membahasnya secara luas dalam karya-karya mereka tentang ekonomi politik dan perjuangan kelas.

Dalam teori Marxis, kaum proletar merupakan pusat analisis perjuangan kelas dan perubahan sejarah. Marx percaya bahwa mode produksi kapitalis mengarah pada pembagian mendasar antara borjuasi (kelas kapitalis) dan proletariat (kelas pekerja). Menurutnya, sistem kapitalis secara inheren mengeksploitasi proletariat dengan mengekstraksi nilai lebih dari kerja mereka, yang menyebabkan ketidaksetaraan dan konflik

kelas. Marx meramalkan bahwa ketika kapitalisme berkembang, kontradiksi dan ketegangan antara borjuasi dan proletariat akan meningkat. Ini pada akhirnya akan menghasilkan revolusi proletar, di mana kelas pekerja akan menggulingkan sistem kapitalis, merebut alat produksi, dan mendirikan masyarakat tanpa kelas. Konsep revolusi dan peran proletariat ini merupakan landasan pemikiran Marxis.

Sepanjang sejarah, sifat kerja dan komposisi kelas pekerja telah berkembang. Pada masa Marx, kelas pekerja industri di pabrik-pabrik merupakan manifestasi proletariat yang menonjol. Namun, dengan kemajuan teknologi dan perubahan pasar tenaga kerja, komposisi kelas pekerja menjadi lebih beragam. Diskusi kontemporer tentang proletariat sering mempertimbangkan pekerja yang lebih luas, termasuk pekerja di industri jasa, *gig economy*, dan sektor informal. Beberapa kritikus berpendapat bahwa konsep tradisional proletariat, seperti yang digariskan oleh Marx, mungkin tidak sepenuhnya mencakup kompleksitas dinamika tenaga kerja modern dan kapitalisme global.

Dalam diskusi modern, konsep proletariat masih relevan ketika menelaah isu ketimpangan pendapatan, hak buruh, dan kesenjangan kelas. Gerakan-gerakan yang mengadvokasi hak-hak pekerja, upah yang adil, dan kondisi kerja yang lebih baik terus menarik inspirasi dari konsepsi sejarah ini. Patut diingat bahwa diskusi tentang proletariat dan dinamika kelas dapat bervariasi berdasarkan perspektif ideologis, disiplin akademis, dan konteks sejarah yang berbeda. Tapi secara garis besar, gerakan politik proletariat mengacu pada tindakan, ideologi, dan perjuangan kolektif yang dilakukan oleh kelas pekerja untuk memajukan hak, kepentingan, dan kondisi mereka dalam konteks masyarakat kapitalis.

Beberapa kata kunci dalam memahami konsepsi proletar yang terkait dengan politik adalah gagasan tentang perjuangan kelas, yaitu antara borjuasi (kelas kapitalis) dan proletariat (kelas pekerja). Adapun tujuan dari gerakan politik kaum proletar biasanya berfokus pada peningkatan kondisi kerja, pencapaian upah yang lebih baik, pengamanan hak-hak buruh, dan pada akhirnya menantang sistem kapitalis itu sendiri.

Gerakan-gerakan ini sering kali bertujuan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi, praktik buruh yang eksploitatif, dan konsentrasi kekayaan dan kekuasaan di kalangan borjuasi. Gerakan proletar sering kali melibatkan aksi kolektif seperti pemogokan, protes, demonstrasi, dan pembentukan serikat buruh. Tindakan ini ditujukan untuk memberikan tekanan pada pengusaha dan pemerintah untuk memenuhi tuntutan pekerja. Dalam perjuangannya, instrumentasi gerakan proletar di antaranya memanfaatkan serikat buruh atau serikat pekerja untuk memainkan peran penting dalam mengorganisir dan memobilisasi massa. Mereka bernegosiasi dengan majikan atas nama pekerja untuk mendapatkan upah, tunjangan, keamanan kerja, dan kondisi kerja yang lebih baik. Serikat juga menyediakan platform bagi pekerja untuk secara kolektif mengadvokasi kepentingan mereka.

Diskursus klasik perjuangan kaum proletar dalam teori Marxis mengembangkan pengandaian adanya penggulingan kapitalisme oleh proletariat melalui revolusi, yang mengarah pada pembentukan masyarakat

tanpa kelas atau yang diistilahkan masyarakat komunis. Menuju ke destinasi ideal tersebut, dikenalkan Sosialisme, sebagai tahap perantara, melibatkan kepemilikan kolektif atas alat-alat produksi. Menurut catatan sejarah, gerakan kaum proletar yang mengusung ideologi sosialisme atau komunisme telah demikian Panjang. Di antara percik gerakan itu yang terkemuka di antaranya; (1) Revolusi Rusia 1917 atau dikenal juga sebagai Revolusi Bolshevik yang dipimpin oleh Vladimir Lenin dan Partai Bolshevik. Tujuannya untuk menggulingkan sistem kapitalis dan mendirikan negara sosialis di Rusia. Kelas pekerja memainkan peran penting dalam gerakan ini (lihat Smith, 2002); (2) Protes Mei 1968. Ini terjadi di Prancis dalam bentuk gelombang besar demonstrasi, pemogokan, dan pendudukan oleh mahasiswa dan pekerja. Gerakan tersebut berdampak signifikan pada masyarakat dan politik Prancis; (3) Pergerakan buruh yang menyeruak sepanjang sejarah di berbagai negara. Agenda perjuangannya termasuk advokasi hak-hak pekerja, kondisi yang lebih baik, dan keadilan ekonomi (lihat Silvera, 1971); dan (4) Gerakan

komunis yang juga sempat lahir di berbagai banyak negara lintas benua, termasuk di Indonesia (lihat Benda & McVey, 2009). Gerakan komunis ini bisa ditandai sebagai manifestasi atau ekspresi politik perjuangan kaum proletar dan mendirikan masyarakat sosialis atau komunis. Saat ini, di antara gerakan komunis yang berhasil bertahan dan berakar kuat bisa disaksikan di Tiongkok, Kuba, dan Vietnam.

Lepas dari pergumulan antar kutub ideologis yang ada, gerakan politik proletariat yang mengambil bentuk beragam dan juga memiliki tingkat keberhasilan yang berbeda-beda, harus diakui bahwa mereka turut berkontribusi dalam menghela perjuangan berkelanjutan untuk keadilan ekonomi dan hak-hak pekerja dalam masyarakat kapitalis. Gerakan-gerakan ini telah memainkan peran penting dalam membentuk undang-undang perburuhan, kebijakan sosial, dan wacana yang lebih luas tentang kesetaraan sosial ekonomi.

Pekerja Kerah Biru

Term asalnya adalah *blue collar workers*, yaitu individu yang dipekerjakan dalam pekerjaan manual atau industri yang biasanya membutuhkan kerja fisik dan keterampilan. Istilah "kerah biru" berasal dari praktik tradisional di mana para pekerja tersebut mengenakan seragam atau pakaian biru untuk menunjukkan status mereka sebagai buruh kerja manual di industri seperti manufaktur, konstruksi, pemeliharaan, pertambangan, transportasi, mekanik, pertanian, dan lainnya. Jika digambarkan, pekerja kerah biru adalah pelaksana tugas-tugas yang sering kali membutuhkan kekuatan fisik, keterampilan teknis, dan pekerjaan langsung. Mereka mungkin bekerja dengan mesin, perkakas, dan peralatan untuk menghasilkan barang, membangun struktur, memperbaiki kendaraan, atau melakukan tugas manual lainnya. Beberapa jenis pekerjaannya, meski tidak menuntut pendidikan ekstensif, tetap memerlukan prasyarat keterampilan dasar dan tak jarang juga membutuhkan pelatihan dan

keahlian khusus, misalnya, tukang listrik, tukang ledeng, dan tukang las.

Sifat pekerjaan kerah biru tersebut tentu mengundang beragam risiko. Secara fisik dapat menyebabkan cedera dan masalah kesehatan jika tindakan keselamatan yang tepat tidak dilakukan. Pada aspek status pekerjaan, mereka juga rentan terhadap fluktuasi ekonomi, yang menyebabkan periode ketidakstabilan pekerjaan atau bahkan pengangguran. Dibandingkan dengan profesi lain yang membutuhkan pendidikan tinggi, peluang kemajuan termasuk karir mungkin terbatas di bidang mereka. Tetapi sifat kerja mereka yang umumnya padat karya, secara kuantitatif mereka dapat dimobilisasi atau memobilisasi diri melalui organisasi berupa serikat buruh atau serikat pekerja yang berperan-fungsi mengadvokasi hak-hak mereka secara kolektif. Termasuk menuntut adanya kondisi kerja yang lebih baik, upah yang layak, dan tunjangan yang adil (lihat Lavelle, 2011).

Secara historis, gerakan politik pekerja kerah biru muncul sebagai tanggapan terhadap tantangan, keluhan,

dan aspirasi spesifik dari individu yang dipekerjakan dalam pekerjaan kasar atau pekerjaan industri. Gerakan-gerakan ini bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah seperti hak-hak buruh, upah yang adil, kondisi kerja yang aman, dan kesetaraan sosial dan ekonomi yang lebih luas. Umumnya, gerakan mereka mendasarkan pada aksi kolektif berupa protes, pemogokan, demonstrasi, dan partisipasi dalam serikat pekerja. Agenda advokasi tak jauh dari perbaikan dan perlindungan hak-hak mereka agar memenuhi unsur kewajaran dan keadilan. Maka representasi politik gerakan pekerja kerah biru sering kali bertujuan untuk memengaruhi keputusan dan kebijakan politik yang berdampak pada kehidupan mereka. Pada level nasional, hal ini mungkin termasuk mendukung kandidat yang memprioritaskan hak-hak pekerja atau mengadvokasi undang-undang yang menguntungkan kelas mereka. Beberapa contoh gerakan pekerja kerah biru antara lain: (1) Gerakan buruh di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Peristiwa penting termasuk Railroad Strike, Haymarket Affair, Homestead Steel Strike, dan Pullman

Strike (lihat Urban, 2020). Federasi Buruh Amerika (AFL) dan Kongres Organisasi Industri (CIO) adalah serikat pekerja berpengaruh yang turut memperjuangkan hak-hak pekerja dan perlakuan yang adil; (2) Gerakan solidaritas di Polandia yang dipimpin oleh para pekerja dan intelektual. Aksi mereka memainkan peran penting dalam sejarah perburuhan dan politik Polandia selama tahun 1980-an. Kekuatan mereka dalam mengadvokasi hak-hak pekerja dan demokrasi pada akhirnya menyebabkan jatuhnya pemerintahan komunis (lihat Kubow, 2013); (3) Pemogokan pertambangan di Afrika Selatan. Sektor pertambangan di negeri ini telah menyaksikan banyak pemogokan dan protes yang dipimpin oleh pekerja kerah biru yang menuntut upah yang lebih baik, kondisi kerja yang lebih baik, dan kesetaraan ekonomi yang lebih besar (lihat James, 1987); (4) Gerakan pekerja tekstil di Bangladesh. Mereka memprotes kondisi kerja yang buruk, upah rendah, dan pabrik yang tidak aman (lihat Khanna, 2011); (5) Pergerakan pekerja otomotif, seperti aksi pemogokan Pekerja Otomotif Bersatu (UAW) di

Amerika Serikat. Tujuan mereka juga untuk mendapatkan upah dan tunjangan yang lebih baik bagi pekerja otomotif (lihat Lichtenstein, 1980).

Contoh-contoh tersebut menyoroti keragaman gerakan pekerja kerah biru di berbagai wilayah dan periode waktu. Tujuan dari gerakan-gerakan ini sering kali melampaui tempat kerja ke isu-isu sosial dan politik yang lebih luas, yang mencerminkan keterkaitan hak-hak buruh, keadilan sosial, dan representasi demokratis. Meskipun belakangan ini, konsepsi perbedaan antara pekerjaan kerah biru dan kerah putih menjadi kurang kaku karena kemajuan teknologi dan perubahan pasar kerja. Banyak pekerjaan kerah biru sekarang menggabungkan unsur teknologi dan otomatisasi, mengaburkan batas antara kerja manual dan tugas intelektual.

Marhaen

Istilah ini berasal dari Indonesia dan terkait erat dengan konteks politik dan sosial Indonesia. Dipopulerkan oleh presiden pertama Indonesia, Sukarno

(1964), dan sering digunakan untuk merujuk pada rakyat jelata, massa, atau kelas pekerja. Istilah tersebut merupakan bagian dari ideologi dan visi populis Sukarno untuk masyarakat yang lebih adil dan merata. Asal muasal term ini dikatakan dari nama seorang petani yang pernah dijumpai oleh Sukarno ketika berada di Bandung. Kisah petani ini kemudian mengilhami Sukarno untuk menjadikan namanya sebagai ikon dan simbol rakyat jelata dan bangsa yang terjajah dalam visi perjuangannya. Dari sini, filosofi dan ajaran politik Sukarno sering disebut sebagai "Marhaenisme". Beliau menekankan pentingnya mengangkat massa dan memenuhi kebutuhan rakyat jelata. Dia percaya bahwa demokrasi sejati dan kemajuan hanya bisa dicapai dengan mengutamakan kesejahteraan kaum Marhaen. Salah satu caranya adalah dengan memperjuangkan reforma agrarian dan keadilan sosial. Dia menganjurkan distribusi tanah yang adil untuk memberi manfaat bagi penduduk pedesaan dan mengurangi kemiskinan di antara para petani. Ide-ide Marhaenis Sukarno lantas terjalin dengan sikap nasionalisme dan anti-

imperialisnya yang tanpa tedeng aling-aling. Dia berusaha untuk membebaskan Indonesia dari pengaruh kolonial dan mempromosikan bangsa yang merdeka dan mandiri.

Meski secara teoritis Marhaenisme Sukarno ini begitu menarik dan memberi warisan ideologis yang sangat kokoh berupa nasionalisme, pemihakan kepada wong cilik, serta anti-imperialisme, ia juga menghadapi kritik karena tantangan implementasi praktisnya. Menurut catatan sejarah, pemerintahan Sukarno telah berusaha menerapkan kebijakan yang selaras dengan cita Marhaenismenya. Di antaranya, menasionalisasi industri-industri utama warisan kolonial dan mendistribusikan kembali tanah kepada petani. Gerakan tersebut memperoleh popularitas yang signifikan, terutama di kalangan penduduk pedesaan dan kelas pekerja, yang melihatnya sebagai simbol harapan untuk masa depan yang lebih baik. Tetapi para kritikus berpendapat bahwa Marhaenisme tidak memiliki kerangka kebijakan yang jelas dan penekanannya pada massa tidak selalu diterjemahkan ke dalam program

ekonomi dan sosial yang efektif. Salah satu konsekuensinya adalah kemerosotan di bidang ini yang pada akhirnya turut mendorong pada kejatuhan kekuasaan politik Sukarno.

Ringkasnya, Marhaenisme dipromosikan sebagai filosofi populis dan nasionalis yang bertujuan untuk memberdayakan massa dan mencapai keadilan dan pemerataan sosial. Hingga detik ini, Marhaenisme masih tetap menjadi bagian penting dari sejarah politik dan wacana budaya Indonesia. Terutama terkait dengan aspirasi rakyat jelata untuk keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan proses politik yang lebih inklusif. Terlepas dari tantangannya, gerakan tersebut berkontribusi dalam membentuk identitas nasional Indonesia dan diskusi berkelanjutan tentang pembangunan sosial dan ekonomi.

Petani

Jika term proletar dan pekerja kerah biru sangat lekat dengan kaum buruh, maka term marhaen tampaknya memiliki spektrum yang lebih luas. Meski dari sejarah awalnya, marhaen identik dengan petani,

sesuai dengan lanskap demografis bangsa Indonesia yang pada masa itu dikenal sebagai bangsa agraris, bangsa petani. Tetapi konsep petani sendiri sebenarnya bisa ditilik sebagai konsep yang mandiri, setara dengan konsep buruh pabrik atau pekerja industri. Mengingat bahwa konsep petani dalam banyak konteks sangat identik dengan wong cilik dan kaum lemah.

Konsep petani sendiri di sini bisa mengacu pada buruh tani atau petani pedesaan yang biasanya tinggal dan bekerja di sebidang tanah kecil, sering menghasilkan makanan untuk penghidupan dan terkadang dijual di pasar lokal. Petani adalah bagian integral dari masyarakat agraris dan telah memainkan peran penting dalam sejarah, Petani terutama terlibat dalam kegiatan pertanian, seperti bercocok tanam, beternak, dan melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pertanian. Mata pencaharian mereka terkait erat dengan tanah tempat mereka bekerja, dan kesejahteraan ekonomi mereka bergantung pada keberhasilan usaha pertanian mereka.

Petani sering mempraktikkan pertanian subsisten, yang berarti mereka bercocok tanam dan memelihara hewan terutama untuk memberi makan diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Surplus produksi dapat dijual atau ditukar dengan barang lain. Peternakan mereka biasanya berskala kecil dan mungkin tidak memiliki akses ke teknologi pertanian canggih atau peralatan modern. Petani biasanya tinggal di daerah pedesaan, jauh dari pusat kota. Kehidupan mereka dipengaruhi oleh musim dan irama siklus pertanian. Rutinitas sehari-hari mereka berpusat pada tugas-tugas pertanian, termasuk menanam, merawat, memanen, dan melestarikan tanaman.

Petani sering mengandalkan praktik pertanian tradisional yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Pengetahuan mereka tentang iklim setempat, jenis tanah, dan metode penanaman tradisional sangat penting untuk keberhasilan mereka sebagai petani. Petani sering kali merupakan bagian dari strata sosial ekonomi yang lebih rendah. Akses mereka yang terbatas ke sumber daya dan pendidikan dapat mengakibatkan

kerentanan ekonomi dan hambatan mobilitas ke atas. Namun, status sosial ekonomi petani dapat sangat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti wilayah, konteks sejarah, dan kebijakan pemerintah. Sementara urbanisasi dan industrialisasi telah menyebabkan perubahan signifikan di banyak masyarakat, petani masih ada di berbagai belahan dunia. Di beberapa daerah, ekonomi agraria tradisional bertahan, sementara di tempat lain, praktik pertanian telah dimodernisasi. Konsep petani tetap relevan dalam diskusi tentang pembangunan pedesaan, kebijakan pertanian, dan ketahanan pangan.

Sepanjang sejarah, petani telah memainkan peran penting dalam perkembangan masyarakat. Gerakan politik petani bisa muncul sebagai upaya kolektif oleh pekerja pertanian pedesaan dan petani skala kecil untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan hak, kondisi ekonomi, kepemilikan tanah, dan representasi politik mereka. Gerakan-gerakan ini terjadi di berbagai wilayah dan periode waktu, masing-masing dengan konteks dan tujuan yang unik. Di Eropa abad pertengahan dan

wilayah lain, mereka menjadi tulang punggung ekonomi feodal, menyediakan makanan dan tenaga kerja untuk mendukung kelas penguasa. Pemberontakan dan gerakan petani, seperti Jacquerie di Prancis (Bessen, 2012), Perang Tani di Jerman (Engels, 1850), dan Pemberontakan Petani di Inggris (Schlauch, 1940), beberapa contoh bagaimana kaum petani terkadang menantang kondisi sosial dan ekonomi yang menindas mereka. Contoh lainnya bisa dilihat pada Revolusi Meksiko (1910-1920), yang memobilisasi petani, masyarakat adat, dan buruh tani yang berjuang untuk reformasi tanah, kondisi kerja yang lebih baik, dan representasi politik (Ouweneel, 1990). Sejarah protes petani di Meksiko kembali berulang ketika terjadi Pemberontakan Chiapas yang dimotori gerakan Zapatista pada tahun 1994 (Harvey, 1998). Ada juga gerakan Naxalite di India pada akhir 1960-an (Dasgupta, 1978). Sebuah pemberontakan petani dan suku yang diilhami oleh Maois melawan ketidakberdayaan, eksploitasi, dan ketidaksetaraan. Gerakan ini bertujuan untuk mengatasi masalah sosial ekonomi dan politik di

daerah pedesaan. Lalu gerakan buruh tanpa tanah atau *Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra* (MST) di Brasil yang belakangan dikenal sebagai salah satu gerakan petani terbesar di dunia. Gerakan ini mengadvokasi reformasi tanah, hak-hak pekerja pedesaan, dan keadilan sosial bagi petani tak bertanah (Carter, 2010). Di Filipina, Pemberontakan Hukbalahap dan gerakan petani berikutnya juga bisa dibaca sebagai aksi kaum petani yang bertujuan untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi seperti tidak memiliki tanah dan kemiskinan pedesaan (Greenberg, 1986). Sedangkan di Indonesia, Pemberontakan Petani Banten (Kartodirdjo, 2015) menjadi contoh sejarahnya.

Jika ditelaah, maka gerakan petani biasanya melibatkan pengorganisasian dan mobilisasi komunitas pedesaan untuk secara kolektif mengatasi keluhan bersama. Keluhan ini sering kali mencakup masalah seperti tidak memiliki tanah, praktik perburuhan yang eksploitatif, perpajakan yang tidak adil, dan kurangnya akses ke sumber daya dasar. Dari sekian isu tersebut, kepemilikan tanah dan akses ke tanah sering kali

menjadi pusat gerakan petani. Petani dapat menuntut redistribusi tanah, perlindungan terhadap perampasan tanah, dan pengakuan sistem penguasaan tanah tradisional. Upaya menuntut keadailan ekonomi juga dapat bergerak lebih maju menjadi upaya mengamankan perwakilan politik di legislatif maupun eksekutif untuk memperjuangkan hak-hak mereka dalam proses pengambilan keputusan publik. Contoh-contoh yang diungkap tersebut sebenarnya cukup menggambarkan bagaimana keragaman konteks di mana gerakan petani muncul. Sering kali gerakan mereka didorong oleh keinginan bersama untuk perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Sementara tujuan dan hasil spesifik dari gerakan ini berbeda-beda, mereka menyoroti agensi dan kekuatan kolektif penduduk pedesaan untuk menentang ketidakadilan dan mengadvokasi hak-hak mereka.

Beberapa konsep kunci yang terkait dengan wong cilik seperti dipaparkan di atas setidaknya memberi keluasan pemahaman bahwa isu wong cilik tidak sesederhana penampakan lahir kehidupan mereka. Konsep wong cilik, termasuk kaum marginal, hoi holloi, kaum proletar, kaum

buruh, pekerja kerah biru, marhaen, dan juga petani kecil, telah terbukti dalam sejarahnya memberi warna yang pekat dan beragam dalam lanskap perjuangan menuntut keadilan atau perbaikan kondisi hidup dan penghidupan. Secara karakteristik, mereka umumnya dipersepsi sebagai kelompok-kelompok yang terpinggirkan dan lemah baik dari sisi sosial, pendidikan, ekonomi, maupun politik. Hal ini ketika disadari atau karena tekanan historis yang mengharuskan mereka bergerak, memantik lahirnya solidaritas dan sekaligus upaya mengorganisir diri untuk berjuang bersama merubah nasib. Mereka berusaha untuk bisa mengatasi masalah mereka sendiri dan menentukan nasib mereka sendiri. Titik ini bisa menjadi titik konvergensi sekaligus titik interseksionalitas yang menjadikan gerakan wong cilik bisa sangat kompleks secara identitas. Spektrum advokasi perjuangan mereka bisa menyentuh tuntutan perbaikan dan pemenuhan hak sipil, hak sosial, hak ekonomi, dan perwakilan politik. Mereka berjuang agar diskriminasi dan ketidaksetaraan tidak bisa melanggengkan dirinya.

Wong Cilik dan Politik

Berbagai teori mengenai wong cilik merupakan kerangka yang bisa digunakan untuk memahami dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang mengarah pada pengucilan, ketidakberuntungan, dan terbatasnya kesempatan yang dialami oleh kelompok tertentu dalam masyarakat. Teori-teori ini membantu menjelaskan akar penyebab marginalisasi dan memberikan wawasan tentang cara mengatasi masalah ini.

Pertama, dari perspektif teori stratifikasi sosial, masyarakat dilihat sebagai susunan secara hierarkis berdasarkan faktor-faktor seperti kelas, ras, jenis kelamin, dan etnis. Ini menjelaskan bahwa kelompok yang terpinggirkan sering kali menempati posisi yang lebih rendah dalam hierarki ini karena faktor sejarah, ekonomi, dan struktural. Teori stratifikasi sosial menekankan distribusi sumber daya, peluang, dan kekuasaan yang tidak merata yang mengarah pada marginalisasi populasi tertentu (lihat Hess, 2001).

Kedua, melalui teori interseksionalitas, diakui bahwa individu dapat mengalami berbagai bentuk ketidakberuntungan secara bersamaan karena persinggungan berbagai identitas (seperti ras, gender, kelas, dan seksualitas). Ini menyoroti bagaimana identitas yang saling berhubungan ini berkontribusi pada pengalaman unik marginalisasi yang tidak dapat sepenuhnya dipahami dengan memeriksa setiap identitas secara terpisah (Bottero, 2005).

Ketiga, fungsionalisme struktural, akan mengkaji bagaimana berbagai bagian masyarakat bekerja sama untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan (lihat Varshney, 1978). Dalam konteks marginalisasi, teori ini menunjukkan bahwa kelompok yang terpinggirkan dapat dianggap memiliki peran yang melayani fungsi tertentu dalam masyarakat. Misalnya, perempuan yang terutama bertanggung jawab untuk peran pengasuhan. Namun, teori ini dapat mengabaikan ketidakseimbangan kekuatan dan ketidakadilan yang berkontribusi pada marginalisasi.

Keempat, lensa teori konflik menaruh fokus menekankan perebutan kekuasaan dan ketidaksetaraan yang melekat dalam masyarakat (lihat Williams & Timberlake, 1984). Ini menunjukkan bahwa kelompok yang terpinggirkan sering kali secara sistematis ditindas oleh kelompok dominan untuk mempertahankan keunggulan mereka. Teori ini menyoroti faktor ekonomi, politik, dan sosial yang melanggengkan ketimpangan dan mengarah pada marginalisasi populasi tertentu.

Kelima, menurut teori modal budaya, pengetahuan budaya, pendidikan, dan sumber daya dapat memengaruhi mobilitas dan status sosial individu. Individu dan komunitas yang terpinggirkan mungkin tidak memiliki akses ke modal budaya, yang dapat membatasi kemampuan mereka untuk berhasil dalam masyarakat arus utama (lihat Emmison, 2003)

Keenam, teori ras kritis, yang dalam praktiknya meneliti bagaimana ras dan rasisme bersinggungan dengan hukum, institusi, dan masyarakat. Ini mengkritik struktur sistemik yang melanggengkan ketidaksetaraan dan marginalisasi rasial. Ini menyoroti bagaimana

ketidakadilan historis dan diskriminasi yang berkelanjutan, yang berkontribusi pada ketidakberuntungan yang dialami oleh kelompok minoritas ras dan etnis (Delgado & Stefancic, 2001).

Ketujuh, ada teori pascakolonial yang mengkaji bagaimana warisan kolonialisme terus memengaruhi masyarakat dan komunitas yang terpinggirkan. Ini mengeksplorasi bagaimana dominasi kekuatan kolonial menyebabkan eksploitasi ekonomi, penindasan budaya, dan ketidaksetaraan yang berkelanjutan di bekas koloni (Moore-Gilbert, 1997).

Kedelapan, teori feminis yang meneliti bagaimana diskriminasi berbasis gender dan patriarki berkontribusi pada marginalisasi perempuan dan individu yang beragam gender. Teori-teori ini menyoroti bagaimana norma, institusi, dan praktik budaya masyarakat merugikan dan menindas identitas gender tertentu (Bryson, 2007).

Teori-teori tersebut dapat disimak bahwa masing-masing menawarkan perspektif yang berbeda tentang

mengapa orang-orang yang terpinggirkan mengalami pengucilan dan ketidakberuntungan. Mereka membantu memandu penelitian, kebijakan, dan intervensi yang ditujukan untuk mengatasi ketidaksetaraan sosial dan mempromosikan keadilan sosial. Penting untuk disadari bahwa tidak ada teori tunggal yang dapat sepenuhnya menjelaskan semua aspek marginalisasi, dan pemahaman yang komprehensif sering kali membutuhkan pendekatan titik-temu yang mempertimbangkan berbagai faktor dan perspektif.

Berikutnya, setelah kita memahami banyak teori yang bisa menyajikan analisis ilmiah terkait posisi dan status eksistensial dari wong cilik, ada baiknya dibaca pula bagaimana agensi kelas ini. Penjelasan terkait hal ini, sekalipun ringkas, dapat menjadi penyanding dan penyeimbang dari gambaran tentang wong cilik. Artinya, bahwa wong cilik tidak harus melulu dipahami dalam konteks minornya, sebagai pihak yang dipersepsi sebagai lemah, terpinggirkan, dan mungkin terabaikan atau terabaikan. Bahwa wong cilik juga memiliki elan dan kekuatan unutk menavigasi jalannya sejarah melalui kiprah

agensi mereka, terutama di ranah politik dalam mengadvokasi hak-hak mereka.

Agensi politik wong cilik mengacu pada kemampuan mereka untuk secara aktif terlibat dalam proses politik, mengadvokasi hak-hak mereka, dan melakukan perubahan meskipun posisi mereka secara historis tidak menguntungkan atau dikecualikan dalam masyarakat. Kelompok yang terpinggirkan sering kali menghadapi hambatan struktural yang membatasi akses mereka ke kekuasaan, sumber daya, dan perwakilan. Namun, agen politik memberdayakan mereka untuk menantang hambatan ini, menuntut kesetaraan, dan berpartisipasi dalam membentuk kebijakan dan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Agensi ini tampak melalui partisipasi dalam arena politik, mengungkapkan keprihatinan mereka, serta berkontribusi pada wacana tentang keadilan sosial, hak, dan kesetaraan (Deveaux, 2015).

Melalui Agen politik wong cilik memungkinkan kelompok yang terpinggirkan untuk memiliki suara dan representasi dalam lembaga politik, diskusi publik, dan

proses pengambilan keputusan. Individu dan komunitas yang terpinggirkan dapat terlibat dalam advokasi dan aktivisme untuk meningkatkan kesadaran tentang keprihatinan mereka, menentang kebijakan diskriminatif, dan mendorong perubahan sosial. Kelompok wong cilik sering menemukan kekuatan dalam aksi kolektif, mengorganisir gerakan sosial, protes, dan kampanye untuk memperkuat suara mereka dan menuntut perubahan.

Agensi politik wong cilik ini penting mereka miliki karena di lapangan kelompok ini dipastikan akan sering menghadapi berbagai tantangan. Seperti di antaranya adalah diskriminasi sistemik dan dinamika kekuatan yang tidak setara. Realitas yang dapat membatasi akses ke pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya lain yang diperlukan untuk keterlibatan politik yang efektif. Belum ditambah faktor keterbatasan representasi. Komunitas yang terpinggirkan mungkin kurang terwakili dalam badan-badan politik, membatasi kemampuan mereka untuk mempengaruhi keputusan yang berdampak langsung pada mereka. Sementara faktor kesenjangan

dan kesulitan ekonomi dapat membatasi waktu dan sumber daya individu yang terpinggirkan untuk aktif terlibat dalam partisipasi politik. Beberapa faktor lain yang turut berpotensi menghambat agensi politik wong cilik adalah adanya hambatan bahasa dan budaya serta pengecualian sistemik. Maksudnya, adanya pengecualian historis dan prasangka yang berkelanjutan dapat membuat orang-orang yang terpinggirkan enggan terlibat dalam proses politik.

Meski tidak mudah, dalam praktiknya, gerakan politik wong cilik telah berlangsung dan mewarnai jalannya sejarah manusia dan dunia. Ambil misal, adanya gerakan emansipasi perempuan. Di jalur politik, maka gerakan perempuan untuk menunut memiliki hak memilih, memperoleh hak pilihan politik untuk mempengaruhi kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka. Contoh lainnya adalah gerakan hal sipil di Amerika Serikat, aktivisme kelompok LGBTQ+ dank kaum disabilitas yang menuntut adanya persamaan hak, keterwakilan, dan diakhirinya diskriminasi.

Singkatnya, agen politik dari orang-orang yang terpinggirkan melibatkan kemampuan mereka untuk berpartisipasi, mengadvokasi, dan mempengaruhi proses politik meskipun ada tantangan. Ini adalah aspek penting dari keadilan dan pemberdayaan sosial, memungkinkan komunitas yang terpinggirkan untuk menantang ketidaksetaraan sistemik dan bekerja menuju masyarakat yang lebih inklusif dan adil.

Kanal Perjuangan Politik Wong Cilik

Indonesia adalah negara republik dengan sistem politik yang menganut prinsip demokrasi. Demokrasi politik di Indonesia relatif telah berkembang sejak transisi dari pemerintahan otoriter pada akhir 1990-an. Demokrasi politik Indonesia sendiri diatur oleh UUD 1945, yang menjabarkan prinsip-prinsip negara, susunan pemerintahan, dan hak-hak warga negara. Konstitusi menekankan prinsip-prinsip seperti kedaulatan rakyat, demokrasi, dan keadilan sosial. Dalam sistem ini, di ranah eksekutif, presiden adalah kepala negara dan pemerintahan di Indonesia. Presiden dipilih oleh rakyat melalui pemilihan langsung untuk masa

jabatan lima tahun dan dapat menjabat maksimal dua kali masa jabatan. Presiden menunjuk menteri yang mengepalai berbagai departemen pemerintah. Adapun di ranah legislatif, terdapat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri dari dua kamar: Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR adalah majelis yang bertanggung jawab untuk membuat dan mengesahkan undang-undang. DPD mewakili kepentingan daerah dan terlibat dalam urusan legislasi nasional.

Politik di Indonesia dalam praktiknya menganut sistem multipartai. Partai politik memainkan peran penting dalam proses demokrasi. Untuk berpartisipasi dalam pemilu, partai harus memenuhi persyaratan tertentu dan mendapatkan jumlah minimum kursi di legislatif nasional atau legislatif daerah. Partai mewakili berbagai macam ideologi dan kepentingan. Merekalah yang berkontestasi dalam pemilihan umum (pemilu) yang diselenggarakan secara rutin di berbagai tingkat pemerintahan.

Indonesia mempraktikkan bentuk desentralisasi yang memberikan tingkat otonomi kepada provinsi, kabupaten, dan kota. Hal ini bertujuan untuk mengakomodir keragaman penduduk dan kebutuhan lokal Indonesia. Adapun terkait kemerdekaan dan kebebasan sipil, Indonesia mengakuinya. Di antara kebebasan sipil yang mendasar itu termasuk kebebasan berbicara, pers, berkumpul, dan beragama. Namun, ada beberapa contoh pembatasan hak-hak ini dalam kasus-kasus tertentu, khususnya terkait dengan isu-isu seperti kerukunan umat beragama dan masalah keamanan.

Meskipun arah langkah berdemokrasi dinilai masih berjalan baik, banyak tantangan yang harus dihadapi. Korupsi, patronasi politik, dan akses sumber daya yang tidak setara tetap menjadi perhatian. Selain itu, isu-isu yang berkaitan dengan ketegangan agama dan etnis, pelanggaran hak asasi manusia, dan masalah lingkungan terus menjadi tantangan bagi proses demokrasi.

Praktik demokrasi di Indonesia telah menghadapi beberapa anomali dan penyimpangan politik yang menimbulkan kekhawatiran tentang realisasi penuh

prinsip-prinsip demokrasi (lihat Robison & Hadiz, 2004). Sementara Indonesia telah membuat kemajuan yang signifikan dalam transisi menuju demokrasi sejak jatuhnya rezim otoriter pada akhir 1990-an, ada beberapa contoh di mana praktik demokrasi menghadapi tantangan dan persoalan.

Pertama, korupsi. Kasus korupsi di lingkungan politik, birokrasi, dan penegakan hukum telah menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas upaya antikorupsi dan dampaknya terhadap pemerintahan yang demokratis (Bubandt, 2014). Kedua, kecurangan pemilu. Meskipun pemilihan umum di Indonesia secara umum dianggap bebas dan adil, ada tuduhan pembelian suara, penipuan, dan penyimpangan dalam beberapa kasus. Anomali ini dapat merusak kredibilitas proses pemilu dan berdampak pada legitimasi wakil terpilih. Ketiga, praktik politik uang. Besarnya biaya politik kandidasi dan elektoral dinilai menyebabkan perwakilan yang tidak setara dan akses terbatas bagi kandidat tanpa sumber daya keuangan yang signifikan. Hal ini dapat mengakibatkan lapangan permainan yang tidak

seimbang dan menguntungkan elit politik atau individu kaya. Keempat, akuntabilitas publik. Dalam beberapa kasus, pejabat pemerintah, penegak hukum, dan personel militer dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia tanpa menghadapi pertanggungjawaban yang memadai. Kurangnya akuntabilitas ini menimbulkan kekhawatiran tentang perlindungan hak-hak warga negara dan supremasi hukum. Kelima, intoleransi dan politik identitas. Dengan penduduk yang sangat beragam, isu intoleransi masih belum padam. Indonesia telah menyaksikan ketegangan agama dan contoh diskriminasi terhadap agama dan etnis minoritas. Serangan terhadap kelompok agama minoritas dan pemberlakuan undang-undang penodaan agama telah menimbulkan kekhawatiran tentang perlindungan hak-hak minoritas.

Kekhawatiran lainnya yang juga bisa turut mempengaruhi praktik demokrasi di Indonesia adalah masalah independensi peradilan. Campur tangan politik dan korupsi dalam sistem peradilan dapat merusak aturan hukum dan kepercayaan warga negara terhadap

proses hukum. Penting untuk dicatat bahwa problematika ini tidak hanya terjadi di Indonesia dan dapat ditemukan di berbagai negara demokrasi di seluruh dunia. Mengatasi tantangan ini memerlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat institusi demokrasi, melindungi kebebasan sipil, mempromosikan transparansi dan akuntabilitas, dan memastikan keterwakilan yang setara bagi semua warga negara.

Berbagai catatan persoalan dalam praktik demokrasi di Indonesia, harus tetap diakui bahwa setiap warga negara memiliki hak dan jaminan politik yang setara. Mereka, termasuk wong cilik, dapat terlibat dalam diskusi, debat, dan pengambilan keputusan terkait dengan isu dan kebijakan politik. Pertanyaannya, melalui saluran apa wong cilik bisa mengkanalisasi aspirasi dan perjuangan politiknya. Secara umum, dua pintu tetap terbuka bagi mereka, baik jalur perjuangan struktural maupun jalur perjuangan kultural.

Di Indonesia, seperti di banyak negara, kemampuan rakyat kecil untuk bisa terlibat dalam kegiatan politik

sangat penting untuk mencapai keadilan sosial, kebijakan yang adil, dan pemerintahan yang inklusif. Namun, penting untuk menyadari bahwa tidak semua individu kelas bawah memiliki tingkat akses yang sama terhadap pertimbangan politik, dan upaya harus dilakukan untuk mengatasi hambatan dan memastikan bahwa suara mereka didengar dalam proses demokrasi.

BAB 3
WONG CILIK DAN PRESEDEN DEMOKRASI

Tidak mudah memberi definisi formal terkait apa yang dimaksud dengan ingatan sejarah *(historical memory).* Secara operasional, ingatan sejarah merujuk pada daya yang memungkinkan sejarah dapat tertransmisikan secara sosial, kultural, maupun politik melalui kelompok atau komunitas manusia. Ingatan sejarah ini bernilai karena ia membantu kita menemukan kegunaan dari sejarah serta membantu kita dapat melihat bahwa masa lalu itu dibingkai, dikendalikan, dipelihara, serta ditransmisikan (Helmsing, 2021).

Peristiwa sejarah tentu bisa dimaknai secara beragam oleh para pembacanya. Bersama dengan kepentingan yang berbeda yang melekatinya, ingatan sejarah bisa menjadi semacam medan pertempuran antar perspektif yang ada (Scott, 2021). Tetapi dalam suatu kelompok masyarakat dikenal juga apa yang disebut sebagai ingatan kolektif *(collective memory).* Term yang bisa diberi pengertian sebagai
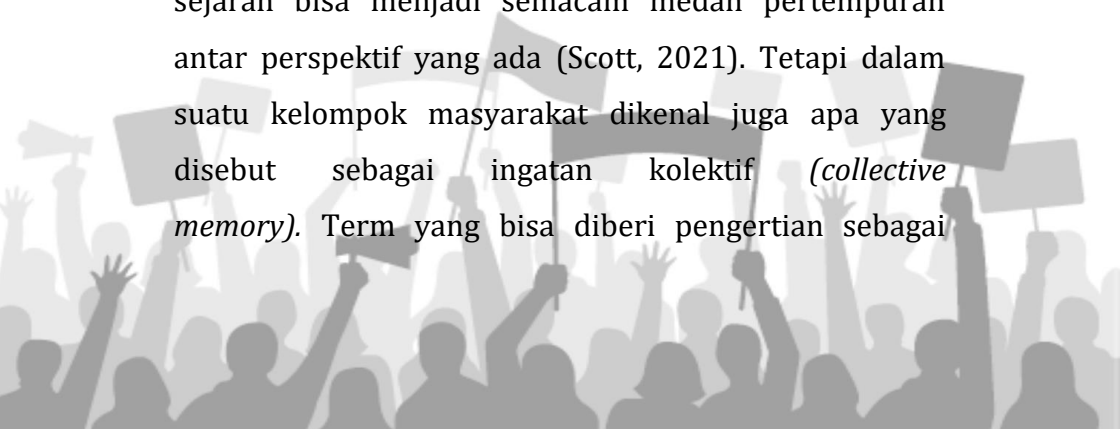
kumpulan ingatan, pengetahuan, dan informasi bersama dari suatu kelompok sosial tertentu secara signifikan dan terkait dengan identitas kolektif yang mereka miliki (Roediger and Abel, 2015; Olick, Vinitzky-Serioussi, dan Levy, 2011; Hirst dan Manier, 2008).

Dalam kajian sejarah, ingatan kolektif ini diyakini dapat direkonstruksi secara ilmiah. Meskipun narasi sejarah yang terbangun mungkin tidak lepas dari kekurangan atau kekeliruan (Guha, 2019). Melalui upaya pembuktian yang hati-hati, fakta sejarah yang menggambarkan peristiwa yang sebenarnya terjadi dipercaya bisa dilakukan (Steinhauer, 2017). Patrick B. Finney (2014) berpandangan bahwa kajian serius mengenai ingatan sejarah kolektif ini sudah saatnya dijadikan agenda oleh para sejarawan sebagai alternatif baru dari perkembangan kajian sejarah. Kecenderungan pada fokus budaya *(cultural turn)* bisa direbut kembali menjadi kajian sejarah yang fokus pada ingatan *(memory).*

Ingatan Sejarah Kolektif

Sejarah kolektif mengacu pada gabungan pengalaman sejarah, peristiwa, dan perkembangan yang telah membentuk masyarakat, budaya, dan peradaban dari waktu ke waktu. Ini mencakup kisah, pencapaian, tantangan, dan transformasi yang telah terjadi dalam skala yang lebih luas, memengaruhi kelompok orang, komunitas, dan bahkan seluruh bangsa. Sejarah kolektif sering melibatkan peristiwa dan pengalaman yang dibagikan oleh sekelompok orang. Peristiwa ini mungkin momen penting seperti perang, revolusi, kemajuan teknologi, gerakan budaya, dan perubahan sosial. Mereka membantu menciptakan identitas bersama dan rasa memiliki di antara anggota masyarakat.

Sejarah kolektif bisa menjadi pintu untuk melacak evolusi budaya dan tradisi dari generasi ke generasi. Ini termasuk pengembangan bahasa, seni, agama, filsafat, dan aspek lain dari budaya manusia. Interaksi antara budaya yang berbeda juga berkontribusi pada permadani kompleks sejarah kolektif. Artinya, sejarah kolektif dapat membantu memberi gambaran

perkembangan atau kemajuan masyarakat dan peradabannya di berbagai bidang. Tapi tak melulu bicara tentang pencapaian, sejarah kolektif juga ditandai dengan konflik, tantangan, dan perjuangan. Perang, krisis ekonomi, ketidaksetaraan sosial, dan masalah lingkungan adalah hal yang bisa menjadi bagian dari sejarah ini. Nah, bagaimana masyarakat menavigasi dan menyelesaikan tantangan ini dapat memberikan wawasan tentang ketahanan dan kemampuan beradaptasi mereka.

Sejarah kolektif dengan demikian merupakan konstruksi dari beragam unsur yang saling terhubung dan memberi pengaruh. Faktor individu seperti sosok pemimpin, pemikir, seniman, dan inovator dapat memainkan peran penting dalam membentuk sejarah kolektif. Ide, tindakan, dan kontribusi mereka dapat menyebabkan perubahan transformatif yang memiliki efek abadi pada masyarakat. Faktor perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga tidak bisa diabaikan. Ketika dunia menjadi lebih terhubung melalui perdagangan, komunikasi, dan teknologi, sejarah kolektif pada gilirannya ikut menjadi lebih bersifat global.

Peristiwa di satu bagian dunia dapat memiliki konsekuensi luas yang berdampak pada seluruh dunia.

Sejarah kolektif memang secara harfiah mengimperatifkan adanya kesatuan dari keragaman. Tetapi harus diinsafi bahwa sejarah kolektif sebagai suatu narasi tidak bisa dilepaskan dari faktor interpretasi yang sangat membuka peluang adanya perbedaan karena perspektif yang diterapkan dalam mendekati dan memahami sejarah berbeda. Interpretasi ini dapat bervariasi berdasarkan faktor budaya, politik, dan sosial, yang mengarah pada pemahaman bernuansa sejarah. Belum lagi aspek sumber sejarah yang dipakai, bias, dan sekaligus metoda pengkajian yang akan turut membentuk bagaimana suatu peristiwa itu dipahami. Dan melalui historiografi, bagaimana cara peristiwa itu ditulis dan didokumentasikan juga tak luput dari kemungkinan keberbedaan. Tetapi apapun itu, kehadiran narasi atau historiografi sejarah kolektif akan sangat penting bagi masyarakat sebagai jembatan untuk belajar dari masa lalu, membuat keputusan untuk masa depan, dan menumbuhkan rasa identitas bersama. Hal

tersebut kemudian memungkinkan kita untuk menghargai pencapaian dan perjuangan mereka yang datang sebelum kita dan mengakui keterkaitan komunitas global kita.

Pada titik ini perlu kiranya dipahami relasi sekaligus mungkin distingsi antara sejarah kolektif dan memori kolektif. Memori kolektif memang sering terjalin dengan sejarah kolektif, karena mencerminkan narasi dan interpretasi peristiwa sejarah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Memori kolektif mengacu pada ingatan bersama dan pemahaman tentang peristiwa sejarah, pengalaman, dan fenomena budaya dalam suatu masyarakat atau sekelompok orang. Ini adalah cara komunitas mengingat dan menafsirkan masa lalunya, membentuk identitas, nilai, dan perspektifnya.

Beberapa hal pokok yang penting untuk diketahui untuk memahami memori kolektif di antaranya adalah: (1) Konstruksi sosial. Bahwa memori kolektif bukanlah rekaman objektif masa lalu, melainkan fenomena yang dibangun secara sosial. Hal itu dipengaruhi oleh norma-norma budaya, nilai-nilai sosial, agenda politik, dan

kepentingan berbagai kelompok. Akibatnya, komunitas yang berbeda mungkin mengingat peristiwa sejarah yang sama secara berbeda; (2) Memori selektif. Memori kolektif dapat melibatkan mengingat atau melupakan secara selektif peristiwa atau aspek sejarah tertentu. Beberapa peristiwa mungkin ditekankan dan diingat dengan jelas, sementara yang lain diremehkan atau diabaikan. Pilihan ini sering kali mencerminkan kebutuhan dan prioritas masyarakat pada waktu tertentu; (3) Narasi dan mitos. Memori kolektif sering disampaikan melalui narasi dan mitos yang membentuk cara orang memahami masa lalu mereka. Narasi ini menciptakan rasa identitas dan rasa memiliki, memperkuat nilai dan cita-cita komunitas; (4) Monumen dan tugu peringatan. Kehadiran penanda fisik seperti monumen, tugu peringatan, dan museum memainkan peran penting dalam membentuk ingatan kolektif. Mereka berfungsi sebagai pengingat nyata dari peristiwa dan tokoh sejarah, membantu melestarikan dan meneruskan ingatan akan peristiwa tersebut ke generasi mendatang; (5) Ragam 'ritual' peringatan. Acara khusus

untuk memperingati atau merayakan adalah momen ketika masyarakat berkumpul untuk mengingat peristiwa sejarah yang penting. Peristiwa ini membantu memperkuat memori kolektif dan memberikan kesempatan untuk refleksi dan dialog; (6) Interaksi dengan sejarah. Memori kolektif dan sejarah kolektif saling berhubungan. Sementara sejarah berusaha untuk membuat catatan faktual tentang peristiwa masa lalu, ingatan kolektif berfokus pada bagaimana peristiwa itu diingat, ditafsirkan, dan ditransmisikan melalui waktu; (7) Perubahan dari waktu ke waktu. Memori kolektif tidak statis; itu dapat berubah dari waktu ke waktu karena pergeseran nilai-nilai sosial, informasi baru terungkap, atau penafsiran ulang peristiwa sejarah. Akibatnya, cara masyarakat mengingat masa lalunya dapat berkembang; (8) Transmisi antar generasi. Memori kolektif diturunkan dari satu generasi ke generasi lain melalui penceritaan, pendidikan, praktik budaya, dan media. Setiap generasi berkontribusi pada pelestarian dan pembentukan kembali memori kolektif; dan (9) Identitas dan persatuan. Memori kolektif

memupuk rasa identitas dan persatuan di antara anggota komunitas. Ini membantu orang terhubung dengan warisan budaya mereka dan memahami bagaimana masa lalu mereka telah memengaruhi keadaan mereka saat ini.

Jadi, memahami memori kolektif memberikan wawasan tentang bagaimana masyarakat membangun identitas mereka, menetapkan nilai, dan menavigasi tantangan kontemporer berdasarkan interpretasi mereka terhadap masa lalu. Ini juga menyoroti sifat dinamis dari sejarah dan ingatan, karena masyarakat terus menegosiasikan kembali hubungan mereka dengan peristiwa yang telah membentuknya. Maka menjadi relevan dan perlu kiranya, pada konteks ini ditilik beberapa teori yang bisa menjadi suluh dan memberi terang pada kita untuk memahami ingatan sejarah *(historical memory),* khususnya ingatan sejarah kolektif *(collective historical memory).*

Ada beberapa teori dan kerangka kerja yang dapat membantu menjelaskan bagaimana sejarah kolektif dan ingatan kolektif dibentuk, dipertahankan, dan berkembang dalam masyarakat. Teori-teori ini

menawarkan wawasan ke dalam proses psikologis, sosiologis, dan budaya yang membentuk cara sekelompok orang mengingat dan menafsirkan masa lalu mereka. Berikut adalah beberapa teori yang menonjol:

Teori Memori Kolektif

Teori ini, yang dikembangkan oleh Maurice Halbwachs (2023; 1992), menekankan bahwa memori individu dipengaruhi oleh konteks sosial dan pengalaman bersama. Memori kolektif dibangun melalui interaksi dalam kelompok sosial. Orang-orang mengingat peristiwa dalam kaitannya dengan identitas sosial mereka dan kelompok tempat mereka berada.

Halbwachs sendiri adalah seorang sosiolog Perancis dan salah satu pelopor dalam studi memori kolektif. Karyanya berfokus pada bagaimana ingatan individu dibentuk oleh interaksi sosial dan bagaimana masyarakat membangun ingatan bersama. Teori Halbwachs menekankan sifat sosial memori dan bagaimana hal itu dipengaruhi oleh dinamika kelompok, konteks budaya, dan hubungan sosial. Idenya

meletakkan dasar untuk memahami bagaimana ingatan kolektif muncul dalam kelompok sosial.

Konsep kunci dalam teori Halbwachs meliputi: (1) Kerangka sosial memori. Menurutnya, memori bukan semata-mata fenomena individu tetapi terkait erat dengan konteks sosial di mana individu hidup. Dia percaya bahwa orang mengingat peristiwa dan pengalaman dalam kerangka kelompok sosial mereka, seperti keluarga, komunitas, atau bangsa; (2) Memori kolektif. Halbwachs memperkenalkan konsep ini untuk menggambarkan memori bersama yang muncul dalam kelompok. Dia percaya bahwa individu mengingat peristiwa tidak dalam isolasi tetapi sebagai bagian dari kolektif, dibentuk oleh interaksi dan diskusi yang mereka lakukan dengan orang lain di lingkaran sosial mereka; (3) Representasi dominan. Halbwachs mengusulkan bahwa masyarakat membangun representasi dominan dari masa lalu yang selaras dengan norma budaya, nilai, dan identitas kelompok mereka. Representasi ini dibentuk oleh mereka yang berkuasa dan memengaruhi bagaimana peristiwa diingat dan diinterpretasikan oleh

kelompok; (4) Memori individu dan kelompok. Interaksi antara memori individu dan memori kolektif di sini disoroti. Ingatan individu dipengaruhi oleh konteks sosial dan narasi kolektif dari kelompok tempat individu berada. Pada saat yang sama, ingatan individu berkontribusi pada pembentukan dan penguatan ingatan kolektif; dan (5) Lokasi dan ruang. Halbwachs juga membahas peran ruang fisik dalam membentuk memori. Dia mencatat bahwa individu mengingat peristiwa dalam kaitannya dengan tempat terjadinya. Lingkungan yang dilestarikan, *landmark*, dan ruang yang terkait dengan peristiwa tertentu sangat membantu mempertahankan memori kolektif.

Pemikiran Halbwachs ini memiliki dampak yang bertahan lama di bidang studi memori. Konsep dan teorinya tetap dimanfaatkan hingga kini untuk mengeksplorasi bagaimana memori kolektif dibentuk, ditransmisikan, dan diubah dalam masyarakat. Karyanya sangat berpengaruh dalam memahami bagaimana peristiwa sejarah dikenang dalam kaitannya dengan identitas kelompok dan narasi budaya.

Teori Memori Budaya

Dikembangkan oleh cendekiawan Jerman, Jan dan Aleida Assmann (2010; 2011), teori memori budaya mengeksplorasi bagaimana masyarakat dan budaya mengingat masa lalu mereka melalui berbagai bentuk budaya, seperti sastra, seni, ritual, dan simbol. Ini membedakan antara memori komunikatif (memori sehari-hari) dan memori budaya (memori yang dilembagakan) dan bagaimana mereka berinteraksi untuk membentuk memori kolektif. Gagasan mereka berfokus pada bagaimana ingatan ditransmisikan, dipertahankan, dan diubah lintas generasi dan dalam konteks budaya. Mereka telah mengembangkan teori yang mengeksplorasi peran ingatan dalam membentuk identitas, nilai, dan narasi budaya.

Guna memahami teori Jan dan Aleida Assmann, beberapa konsep kunci berikut ini perlu dipahami: (1) Memori budaya. Assmann mengusulkan konsep ini yang mengacu pada memori bersama dari suatu komunitas atau masyarakat yang diturunkan dari generasi ke generasi. Memori budaya mencakup cerita, simbol, ritual,

dan praktik yang membantu suatu kelompok mengingat dan menafsirkan masa lalunya; (2) Memori komunikatif *versus* memori budaya. Mereka membedakan antara keduanya. Memori komunikatif adalah memori informal sehari-hari yang dimiliki bersama di antara individu-individu dalam interaksi mereka. Memori budaya, di sisi lain, lebih terstruktur dan terlembagakan, dilestarikan melalui bentuk-bentuk budaya seperti sastra, seni, agama, dan pendidikan; (3) Ruang memori. Mereka menekankan pentingnya ruang fisik dan simbolik dalam membentuk memori. Ruang-ruang ini, seperti monumen, tugu peringatan, museum, dan situs sejarah, berfungsi sebagai gudang memori dan berkontribusi pada kelangsungan memori budaya; (4) Dinamika memori. Mereka mengeksplorasi bagaimana memori berubah dari waktu ke waktu karena pergeseran konteks budaya dan sosial. Saat masyarakat berevolusi, narasi memori dinegosiasikan ulang untuk mencerminkan perspektif baru dan nilai-nilai masyarakat. Paparan ini menunjukkan adanya kontribusi saling melengkapi antara teori yang dikemukakan Jan dan Aleida Assmann dengan Halbwachs.

Secara garis besar, teori Assmann menyediakan kerangka kerja untuk memahami kompleksitas memori dalam masyarakat, bagaimana masyarakat mengingat, melupakan, dan menegosiasikan masa lalu mereka. Karya mereka berpengaruh dalam mengeksplorasi interaksi antara memori individu dan kolektif, serta peran artefak budaya dalam membentuk narasi memori. Serta berkontribusi pada pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana ingatan berfungsi sebagai fenomena budaya, memengaruhi cara kelompok dan individu berhubungan dengan masa lalu mereka dan membangun identitas mereka.

Teori Identitas Sosial

Teori ini berpendapat bahwa orang mengategorikan diri mereka sendiri dan orang lain ke dalam kelompok sosial, dan rasa identitas mereka terikat pada kelompok ini. Identitas sosial memengaruhi bagaimana individu mengingat dan menafsirkan peristiwa. Memori kolektif dengan demikian dibentuk oleh kebutuhan untuk mempertahankan identitas kelompok yang positif dan membedakan dari kelompok lain. Teori identitas sosial,

yang dikembangkan di bidang psikologi sosial, berfokus pada bagaimana individu mendefinisikan diri mereka sendiri dalam kaitannya dengan kelompok sosial tempat mereka berada. Ini mengeksplorasi bagaimana keanggotaan kelompok mempengaruhi konsep diri, sikap, perilaku, dan hubungan antar kelompok. Teori ini menekankan bahwa orang mengategorikan diri mereka sendiri dan orang lain ke dalam kelompok sosial, dan rasa identitas mereka berasal dari kelompok ini.

Teori identitas sosial memperkenalkan beberapa konsep kunci di antaranya: (1) Kategorisasi sosial. Individu secara alami mengategorikan diri mereka sendiri dan orang lain ke dalam kelompok sosial berdasarkan karakteristik seperti etnis, kebangsaan, jenis kelamin, agama, pekerjaan, dan banyak lagi. Kategori-kategori ini berfungsi sebagai dasar untuk memahami identitas seseorang dan identitas orang lain; (2) *In-group* dan *out-group*. Teori ini membedakan antara *in-group* (kelompok di mana seorang individu berada) dan *out-group* (kelompok di mana seorang individu tidak termasuk). Orang-orang cenderung

mendukung *in-group* mereka dan melihatnya secara lebih positif, sementara kadang-kadang menunjukkan sikap bias atau negatif terhadap *out-group*; dan (3) Perbandingan sosial. Di mana orang memiliki kecenderungan untuk membandingkan kelompok dalam mereka dengan kelompok luar untuk meningkatkan harga diri mereka dan mempertahankan identitas sosial yang positif.

Teori identitas sosial ini antara lain dipopulerkan oleh Henri Tajfel dan John Turner (1970). Teori tersebut menunjukkan bahwa individu berusaha untuk mempertahankan atau meningkatkan harga diri mereka dengan mengidentifikasi dengan kelompok yang sukses atau bernilai positif dan dengan menjauhkan diri dari kelompok yang dianggap inferior. Di sinilah kemudian dikenalkan pula konsep seperti favoritisme dalam kelompok, kategorisasi sosial, dan pemeliharaan harga diri melalui identitas kelompok. Pengembangan teori ini juga bisa dibaca melalui karya Stacks dan Salwen (2008) yang memuat ulasan tentang teori identitas sosial, membahas relevansinya dengan penelitian komunikasi

dan wawasannya tentang bagaimana individu dan kelompok membangun struktur identitas mereka melalui komunikasi.

Ringkasnya, teori identitas sosial ini berperan penting dalam menjelaskan cara keanggotaan kelompok membentuk konsep diri, sikap, perilaku, dan dinamika antarkelompok. Wawasan teoritik ini telah diterapkan secara luas di bidang-bidang seperti psikologi, sosiologi, komunikasi, dan perilaku organisasi untuk memahami bagaimana orang berhubungan satu sama lain dan membentuk identitas sosial dalam konteks masyarakat yang lebih luas.

Teori Naratif

Teori naratif, yang diterapkan pada ingatan kolektif, menyoroti pentingnya mendongeng atau bercerita *(storytelling)* dalam membentuk ingatan. Masyarakat membangun narasi yang menciptakan makna dan koherensi di sekitar peristiwa sejarah. Narasi ini dipengaruhi oleh norma budaya, nilai, dan dinamika kekuasaan. Teori naratif, ketika diterapkan pada sejarah

dan ingatan, berfokus pada bagaimana cerita dan narasi membentuk cara orang mengingat dan menafsirkan masa lalu. Ini menekankan peran mendongeng dalam membangun memori kolektif, mempengaruhi pemahaman sejarah, dan membentuk identitas budaya. Teori ini mengeksplorasi bagaimana narasi menciptakan makna, koherensi, dan keterlibatan emosional dalam kaitannya dengan peristiwa sejarah. Bagi Hayden White (1973), manifestasi kerja sejarah adalah suatu struktur verbal dalam bentuk wacana prosa naratif *(in the form of a narrative prose discourse).*

Narasi adalah pusat kognisi dan komunikasi manusia. Mereka menyediakan struktur yang membantu individu dan masyarakat memahami peristiwa sejarah yang kompleks dengan mengaturnya menjadi cerita yang koheren dan dapat dipahami. Di sini, narasi berfungsi dalam pembuatan makna *(as meaning-making).* Suatu narasi juga dapat berfungsi membangkitkan emosi dan melibatkan audiens pada tingkat pribadi *(engagement)*. Dengan menghubungkan aspek emosional dari peristiwa sejarah, narasi dapat memiliki dampak yang bertahan

lama pada bagaimana peristiwa diingat dan dihargai. Narasi pada gilirannya menunjukkan keterkaitan dengan identitas di mana individu membangun rasa diri mereka melalui cerita yang mereka ceritakan tentang kehidupan mereka sendiri dan hubungan mereka dengan peristiwa sejarah. Narasi pribadi terjalin dengan narasi kolektif yang membentuk identitas budaya. Dikatakan oleh Jörn Rüsen (2008), *"historical narration has the general function of orienting practical life in time by mobilizing the memory of temporal experience, by developing a concept of continuity and by stabilizing identity."* Narasi sejarah memiliki fungsi umum untuk mengorientasikan kehidupan praktis dalam waktu dengan memobilisasi memori pengalaman temporal, dengan mengembangkan konsep kontinuitas dan dengan memantapkan identitas. Sementara Alessandro Portelli (1991) meyakinkan bahwa narasi pribadi bisa berkontribusi pada pemahaman sejarah yang lebih luas.

Ikatan emotif tersebut dapat semakin kokoh ketika ke dalam narasi dimasukkan mitos, simbol, dan arketipe yang beresonansi dengan nilai dan kepercayaan budaya.

Elemen-elemen ini meningkatkan kekuatan narasi dan berkontribusi pada dampaknya yang bertahan lama pada ingatan. Suatu memori akan efektif ketika ia sudah berada pada level kolektif, menjadi milik banyak orang (LaCapra, 1998). Namun sebagaimana dalam teori sebelumnya, bagaimana peristiwa sejarah ditafsirkan dan diingat bisa memberikan perspektif dan narasi yang berbeda pada peristiwa yang sama. Kata Paul Ricoeur (2004), *"historians frequently construct different and opposed narratives about the same events."*

Teori-teori ini dengan keragamannya telah memajukan pemahaman kita tentang bagaimana narasi membentuk ingatan sejarah, memengaruhi interpretasi, dan berkontribusi pada pembentukan identitas budaya. Teori naratif menyediakan sebuah lensa di mana kita dapat mengeksplorasi interaksi yang rumit antara sejarah, ingatan, penceritaan, dan konstruksi makna.

Teori Memoryscape

Teori ruang memori ini dikemukakan oleh James V. Wertsch. Ia menekankan aspek spasial dan material dari memori. Memoryscapes mencakup ruang fisik, objek, dan simbol yang berfungsi sebagai pengingat peristiwa sejarah. Ruang-ruang ini dapat memicu dan mempertahankan memori kolektif. Wertsch telah mengembangkan konsep "tindakan yang dimediasi" dan telah mengeksplorasi cara-cara di mana alat-alat budaya, seperti bahasa dan narasi, memediasi kognisi, ingatan, dan pemahaman manusia. Karya Wertsch menyoroti peran faktor budaya dan sosial dalam membentuk proses pemikiran individu dan kolektif.

Gagasan Wertsch berpusat pada konsep ini, yang mengacu pada bagaimana individu terlibat dengan dunia melalui alat dan artefak budaya. Semua itu memediasi interaksi kita, membentuk cara kita merasakan, mengingat, dan memahami dunia di sekitar kita. Basis teoritik Wertsch sebenarnya mengacu pada teori aktivitas budaya-sejarah, yang berasal dari karya psikolog Rusia Lev Vygotsky. Teori tersebut menekankan peran konteks sosial dan budaya dalam membentuk

perkembangan manusia, kognisi, dan pembelajaran. Wertsch memperluas teori ini untuk mengeksplorasi bagaimana alat budaya memengaruhi ingatan, identitas, dan pemahaman sejarah. Bagi Wertsch (1991), *"In contrast, looking at action in isolation, without concern for the mediational means employed, loses sight of one of my most fundamental points and what is perhaps the most central contribution Vygotsky, Bakhtin, and many of their colleagues made to the study of mind: mediated action is an irreducible unit of analysis, and the person(s)-acting-with-mediational-means is the irreducible agent involved."* Jadi, melihat tindakan secara terpisah, tanpa mempedulikan cara mediasi yang digunakan, baginya sudah sesat nalar. Tindakan yang dimediasi adalah unit analisis yang tidak dapat direduksi.

Wertsch (1998) juga menyoroti pentingnya narasi dalam membentuk ingatan dan pemahaman sejarah. Dia menekankan bagaimana individu membangun narasi untuk memahami pengalaman mereka, dan bagaimana narasi ini berkontribusi pada pembentukan memori pribadi dan kolektif.

Mengingat dan Melupakan: Penelitian Wertsch meneliti bagaimana alat budaya memengaruhi proses mengingat dan melupakan. Dia mengeksplorasi bagaimana narasi sosial dan norma budaya dapat memengaruhi apa yang diingat, dilupakan, atau diubah seiring waktu. Kontribusi Wertsch sangat berpengaruh dalam menjembatani kesenjangan antara memori individu dan kolektif, menawarkan wawasan tentang bagaimana faktor budaya dan sosial memengaruhi cara orang mengingat, memahami, dan memaknai pengalaman mereka. Di aras ini, memahami memori kolektif sebagai tindakan termediasi sekaligus sebenarnya memahami bahwa memori kolektif itu dapat terdistribusikan melalui instrumen-instrumen atau alat-alat budaya yang dipakai untuk mengingat masa lalu (Wertsch, 2009).

Teori Amnesia Selektif

Teori ini mengeksplorasi pelupaan atau penekanan yang disengaja dari aspek-aspek sejarah tertentu. Ingatan kolektif sering kali dibentuk tidak hanya oleh apa yang diingat tetapi juga oleh apa yang dihilangkan atau ditekan karena faktor sosial atau politik. Teori ini juga dikenal sebagai memori selektif, berfokus pada penekanan atau pengabaian yang disengaja terhadap peristiwa sejarah tertentu atau aspek sejarah dalam suatu masyarakat atau kelompok. Fenomena ini terjadi karena berbagai alasan, seperti motivasi politik, sosial, atau budaya. Melupakan secara selektif melibatkan pemilihan bagian mana dari sejarah untuk diingat dan mana yang harus dihilangkan, sering kali membentuk memori kolektif suatu masyarakat dengan cara tertentu. Beban masa lalu memang bisa mempengaruhi cara dan orientasi dalam berinteraksi dengannya, apakah melalui cara nostalgia, mengingat status tinggi dan prestise, ataukah melalui cara amnesia historis, melupakan yang tak dikehendaki untuk diingat. Cara ketiga yaitu melalui cara indoktrinasi (Massey, 2011).

Dari uraian ringkas ini dapat diketemukan beberapa konsep kunci yang menyusun bangunan teori memori selektif ini. Pertama, memori strategis, bahwa melupakan secara selektif adalah suatu bentuk keputusan strategis tentang peristiwa sejarah mana yang disorot, dirayakan, atau ditekankan, dan mana yang diremehkan, diabaikan, atau dipinggirkan. Keputusan ini sering dibuat berdasarkan citra atau narasi yang diinginkan yang ingin diproyeksikan oleh masyarakat. Kedua, kontrol politik, bahwa pihak pemerintah dan pemimpin politik mungkin saja terlibat dalam tindakan amnesia selektif dengan maksud untuk mengontrol persepsi publik dan mempertahankan otoritas mereka. Dengan berfokus pada peristiwa tertentu dan menekan yang lain, mereka dapat membentuk identitas nasional dan menjaga kohesi sosial. Ketiga, mitos nasional, di mana pelupaan selektif berkontribusi pada penciptaan mitos dan narasi nasional. Peristiwa sejarah tertentu diangkat untuk melambangkan nilai-nilai, prestasi, atau pengorbanan bangsa, sementara yang lain ditekan jika menantang narasi yang disukai. Keempat, identitas

kolektif, bahwa hal ini dilakukan dengan rasionalitas untuk memperkuat identitas kolektif dengan menekankan peristiwa yang mempromosikan persatuan dan meremehkan peristiwa yang dapat menciptakan perpecahan atau perselisihan.

Dalam teori Halbwachs yang sudah dikemukakan di muka sebenarnya konsep ini juga dijumpai. Memori kolektif menyentuh ide tentang lupa selektif. Di mana diungkapkan bahwa memori kolektif dipengaruhi oleh kelompok sosial dan kepentingan mereka, yang dapat menyebabkan penekanan atau pengabaian peristiwa tertentu. Demikian juga dalam teori Jan dan Aleida Assmann. Teori memori budayanya mengeksplorasi bagaimana masyarakat terlibat dalam mengingat dan melupakan secara selektif. Karya mereka menyoroti bagaimana ingatan budaya dibentuk oleh pilihan sadar dan negosiasi, yang mengarah pada pembentukan ingatan kolektif. Penjelasan yang bisa membantu untuk lebih memahami teori ini adalah karya dari Pierre Nora (1996), seorang sejarawan Perancis. Ia memperkenalkan konsep "situs kenangan" *(lieux de mémoire),* merujuk

pada tempat, objek, dan praktik simbolis yang mewakili dan mewujudkan peristiwa sejarah. Melalui karyanya, Nora meneliti bagaimana masyarakat sengaja membangun memori mereka melalui pilihan selektif.

Teori ini bisa juga dielaborasikan untuk menunjukkan bahwa tradisi dan narasi sejarah mungkin dibangun dan dimanipulasi untuk berbagai tujuan, termasuk pembangunan bangsa dan kohesi sosial (Hobsbawm & Ranger, 1992). Moda lainnya yang juga memungkinkan adanya seleksi memori kolektif adalah karena masyarakat membangun ingatannya sebagai respons terhadap peristiwa traumatis, dan walhasil, secara selektif mereka berfokus pada aspek-aspek tertentu sambil mengabaikan yang lain (Winter, 1995). Teori amnesia selektif menyoroti bagaimana masyarakat membentuk ingatan kolektif mereka dengan memilih apa yang akan diingat dan apa yang akan dilupakan. Ini menimbulkan pertanyaan penting tentang etika konstruksi ingatan, pengaruh dinamika kekuasaan, dan peran narasi sejarah dalam membentuk identitas budaya.

Teori Memori Generasi

Teori ini mengkaji bagaimana memori ditransmisikan lintas generasi. Generasi yang berbeda mengalami dan menafsirkan peristiwa sejarah secara berbeda, yang menyebabkan variasi dalam memori kolektif dari waktu ke waktu. Teori memori generasi mengeksplorasi bagaimana peristiwa dan pengalaman sejarah diingat dan ditransmisikan ke generasi yang berbeda. Ini mengkaji bagaimana berlalunya waktu dan mengubah konteks masyarakat dapat mempengaruhi cara peristiwa dipahami, ditafsirkan, dan diingat oleh generasi berikutnya. Teori ini mempertimbangkan bagaimana perspektif unik setiap generasi membentuk hubungan mereka dengan masa lalu. Studi terkait ini di antaranya telah dilakukan oleh Jeffrey Olick (2007). Dia telah menjelajahi memori generasi dalam konteks peristiwa traumatis dan memori kolektif. Penelitiannya meneliti bagaimana kenangan peristiwa seperti Holocaust ditransmisikan lintas generasi dan bagaimana narasi sejarah berkembang dari waktu ke waktu.

Memori generasi mengakui bahwa setiap generasi mengalami peristiwa sejarah dari perspektif temporal yang berbeda. Peristiwa yang dialami memiliki dampak yang berbeda dibandingkan dengan peristiwa yang dipelajari tentang bekas. Saat ingatan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, ada potensi untuk kesinambungan dan transformasi. Kenangan mungkin dipertahankan, dimodifikasi, atau ditekankan secara selektif berdasarkan nilai, perhatian, dan keadaan yang berkembang dari setiap generasi. Memori generasi dengan demikian bisa berkontribusi pada pembentukan identitas kolektif dalam kelompok usia tertentu. Kenangan bersama tentang peristiwa formatif menciptakan nilai, rasa memiliki dan pengalaman bersama di antara individu yang hidup melalui peristiwa tersebut (Corning & Schuman, 2015). Teori memori generasi menggarisbawahi sifat dinamis memori karena berkembang sepanjang waktu dan antara kelompok usia yang berbeda. Ini menyoroti pentingnya memahami bagaimana perubahan sosial dan budaya memengaruhi

cara peristiwa diingat dan ditransmisikan dari generasi ke generasi.

Postmemory

Dikenalkan oleh Marianne Hirsch (2012; 1997), konsep *postmemory* mengacu pada cara individu yang tidak secara langsung mengalami peristiwa sejarah masih memiliki hubungan emosional yang mendalam melalui ingatan orang tua atau generasi sebelumnya. Postmemory mengeksplorasi bagaimana trauma masa lalu ditransmisikan lintas generasi, bahkan kepada mereka yang tidak secara langsung mengalami peristiwa itu sendiri. Karya Hirsch sangat berpengaruh dalam memahami dampak trauma antargenerasi dan bagaimana hal itu membentuk identitas individu dan kolektif.

Postmemory mengacu pada ingatan akan peristiwa yang tidak dialami individu secara langsung tetapi ditransmisikan kepada mereka melalui cerita keluarga, gambar, dan narasi budaya. Konsep ini mengakui bagaimana trauma generasi masa lalu dapat dirasakan

dan diingat oleh generasi berikutnya, mempengaruhi kesadaran diri mereka dan membentuk pemahaman mereka tentang sejarah. Karya Hirsch sering kali berfokus pada pengalaman para penyintas Holocaust generasi kedua, mereka yang tumbuh bersama orang tua yang terkena dampak langsung Holocaust. Dia mengeksplorasi bagaimana ingatan dan trauma generasi pertama diwarisi oleh anak-anak mereka, memengaruhi identitas dan hubungan mereka dengan sejarah.

Hirsch meneliti bagaimana foto keluarga, cerita, surat, dan materi lainnya berkontribusi pada transmisi postmemory. Artefak visual dan tekstual ini menciptakan jembatan antara masa lalu dan masa kini, yang memungkinkan generasi selanjutnya terhubung dengan peristiwa yang tidak mereka alami secara langsung. Postmemory mendorong eksplorasi celah dan keheningan dalam narasi dan ingatan keluarga. Istilahnya, menginterogasi ketidakhadiran. Dia menekankan bahwa ketiadaan detail tertentu juga dapat membawa makna dan mempengaruhi konstruksi postmemory.

Memori Global

Dalam dunia yang semakin saling terhubung, konsep memori global hadir dengan mempertimbangkan bagaimana memori kolektif melampaui batas-batas nasional atau lokal. Peristiwa dengan signifikansi global dapat membentuk memori kolektif berbagai komunitas di seluruh dunia. Teori memori global mengeksplorasi gagasan bahwa peristiwa atau pengalaman sejarah tertentu melampaui batas-batas nasional atau lokal dan menjadi bagian dari memori kolektif global. Teori ini berfokus pada bagaimana peristiwa sejarah bersama membentuk rasa keterkaitan di antara beragam komunitas di seluruh dunia, memengaruhi cara orang memahami dan mengingat masa lalu dalam skala global. Misalnya studi Levy dan Sznaider (2002) tentang ingatan pada peristiwa holocaust telah membentuk semacam memori kosmopolitan karena sifatnya yang lintas negara.

Teori memori global mempertimbangkan peristiwa yang memiliki dampak luas dan bertahan lama di berbagai wilayah dan budaya. Peristiwa ini sering

melibatkan isu-isu penting global, seperti perang dunia, kemajuan teknologi besar, perjuangan hak asasi manusia, dan krisis lingkungan. Teori ini meneliti bagaimana narasi tentang peristiwa global dibentuk oleh interaksi dan pertukaran di antara budaya yang berbeda. Narasi ini dapat menyoroti kesamaan dan perbedaan dalam cara berbagai masyarakat mengingat dan menafsirkan peristiwa yang sama. Sisi lain, memori global dapat berkontribusi pada pengembangan identitas kosmopolitan, di mana individu melihat diri mereka sebagai bagian dari komunitas global yang lebih luas (Hirsch & Spitzer, 2010). Identitas ini berakar pada pemahaman bersama tentang peristiwa global yang signifikan. Karena sifatnya yang memiliki makna universal yang melampaui batas geografis dan budaya, teori memori global ini bisa menjadi jembatan untuk menyoroti bagaimana ingatan akan masa lalu dapat menumbuhkan rasa kemanusiaan bersama dan mendorong dialog dan pemahaman lintas budaya.

Memori Digital

Dengan munculnya teknologi digital, platform *online*, dan media sosial, bentuk baru dari memori kolektif muncul. Teori memori digital meneliti bagaimana ruang digital mempengaruhi konstruksi, penyebaran, dan pelestarian memori kolektif. Teori memori digital meneliti bagaimana teknologi dan platform digital membentuk kembali cara masyarakat mengingat, mengarsipkan, dan terlibat dengan peristiwa sejarah dan pengalaman pribadi. Teori ini mengeksplorasi dampak digitalisasi pada praktik memori, termasuk pembuatan, penyimpanan, pembagian, dan pelestarian memori dalam format digital.

Teori memori digital membahas bagaimana teknologi digital memungkinkan penyimpanan dan pelestarian sejumlah besar informasi, termasuk dokumen sejarah, gambar, video, dan narasi pribadi, dalam format digital. Teknologi digital menyediakan akses mudah dan luas ke sumber daya memori. Arsip *online*, perpustakaan digital, dan platform media sosial memungkinkan individu untuk terlibat dan

berkontribusi pada konten terkait memori dari mana saja di dunia. Sementara teknologi digital meningkatkan aksesibilitas, mereka juga dapat menyebabkan fragmentasi dan potensi ephemeral berupa hilangnya memori karena keusangan teknologi, korupsi data, atau perubahan platform digital (Hoskins, 2004). Teori memori digital menekankan bagaimana individu secara aktif berkontribusi pada pembuatan dan penyebaran memori melalui konten buatan pengguna di media sosial, blog, dan platform digital lainnya.

Teori-teori tersebut di atas memberikan kerangka kerja yang berharga untuk memahami proses kompleks yang dengannya masyarakat mengingat, menafsirkan, dan mentransmisikan sejarah mereka. Mereka menyoroti interaksi dinamis antara memori individu dan kolektif, budaya, identitas, dan konteks sosial yang lebih luas.

Sejarah Kontestasi Elektoral 2019

Melalui studi lapangan terkait ingatan sejarah kolektif tentang kontestasi elektoral 2019, terutama

pemilihan presiden dan wakil presiden di tiga kabupaten/kota di Jawa Timur, Sidoarjo, Surabaya, dan Bangkalan, diketahui bahwa masyarakat masih memiliki ingatan tentang pelaksanaan Pilpres 2019. Hal ini tergambar antara lain melalui respons yang diberikan oleh seluruh informan tanpa terkecuali berupa tingkat kepuasan terhadap peristiwa demokrasi tersebut. Dari dua kabupaten/kota, yakni Surabaya dan Bangkalan, akumulasi dari yang menyatakan cukup dan sangat puas masih berada di angka lebih dari 50% informan. Sementara dari Sidoarjo justru berbanding terbalik, akumulasi dari yang menyatakan kurang atau tidak puas yang justru lebih dari separuh informan. Fakta yang jika dimaknai bisa memberi informasi bahwa pelaksanaan Pilpres 2019 masih belum memenuhi mayoritas ekspektasi rakyat Indonesia. Kepuasan yang diungkapkan tampak masih menyisakan ruang bagi catatan untuk perlu adanya perbaikan atau peningkatan di pemilu berikutnya.

Mengenai kekurangan dalam pelaksanaan pemilu 2019 yang lalu, terindikasi masih ada. Meski di Surabaya,

yang menjadi salah satu basis dukungan politik PDIP yang merupakan pemenang pemilu sekaligus penopang utama rezim yang tengah berkuasa saat ini, separuh informan menyatakan Pilpres 2019 telah berlangsung secara jujur dan adil, tetapi tidak bisa menghapus data bahwa sebagian warga Surabaya menyatakan adanya dugaan kecurangan. Sementara di Sidoarjo dan Bangkalan, justru porsi terbesar, walaupun masih di bawah angka 50%, menyatakan jika Pilpres 2019 belum berlangsung secara jurdil sepenuhnya.

Ingatan kolektif rakyat sebagaimana tergambar melalui data lapangan juga menampilkan afirmasi bahwa Pilpres 2019 sempat diwarnai adanya kekhawatiran konflik atau gesekan di tengah masyarakat yang berpotensi mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Pembelahan dari dua pendukung kontestan Pilpres 2019 tampaknya mereka pandang dan nilai sebagai suatu hal yang sangat serius dan harus diwaspadai. Persentase antara 62,5% hingga 70% di ketiga kabupaten/kota menjadi penanda faktual bahwa mayoritas rakyat menjumpai dan mengidentifikasi adanya potensi

segregasi dan konflik horizontal dalam perhelatan Pilpres 2019.

Rakyat ternyata juga memiliki pandangan logika-legalistik dalam menyikapi bergabungnya kontestan yang kalah dalam Pilpres 2019 ke dalam struktur kekuasaan yang dipimpin oleh kontestan yang menang. Artinya bahwa kontestan Pilpres yang kalah memilih untuk tidak menjadi oposan yang berada di luar struktur kekuasaan eksekutif, tetapi memutuskan untuk menjadi bagian dari pemerintahan dengan menjadi menteri dalam kabinet yang bertugas membantu Presiden/Wakil Presiden terpilih. Adapun peta persepsi masyarakat terkait hal ini dapat dikatakan bahwa mayoritas rakyat berpandangan bahwa aksi politik, yang disebut-sebut tidak lazim itu, secara logis masih dapat diterima dan tidak menyelisihi atau melanggar aturan hukum, termasuk konstitusi. Sekalipun sebagian masyarakat, meski masuk kategori minoritas, dalam rentang persentase 12,5% hingga 16,7% menyatakan aksi tersebut tidak diperbolehkan. Sistem demokrasi yang mengandaikan adanya perimbangan kekuasaan melalui

kehadiran oposisi yang cukup kuat, yang dalam praktik lazim kontestasi politik selama ini direpresentasikan oleh kekuatan yang kalah dalam pemilu, menjadi terabaikan.

Sementara dari sudut pandang etika politik, praktik yang ditunjukkan oleh kontestan yang kalah dalam Pilpres 2019 dengan naik kapal kekuatan politik pemenang untuk turut menikmati kekuasaan juga menjadi sorotan. Rakyat sebagiannya melihat perilaku tersebut sebagai sesuatu yang tidak pantas dan tidak patut untuk dilakukan. Terlebih dengan proses kontestasi yang tidak murah dan telah menghabiskan energi bangsa demikian besar. Maka ketika yang kalah dan yang menang pada gilirannya bergabung dalam kekuasaan, maka tidaklah berlebihan jika memantik pertanyaan tentang relevansi dan urgensitas diadakannya Pilpres. Di Sidoarjo yang secara historis dikenal menjadi basis dukungan politik PKB, antara yang menyatakan patut dan tidak berimbang, yaitu 33,3%. Sedangkan untuk Surabaya dan Bangkalan, tingkatnya

masih berada di kisaran 63% yang menyatakan pantas atau patut.

Sebaran persentase pandangan etik ini kemudian juga terlihat dalam proporsi yang serupa ketika para informan diminta memberi respon terkait dengan sikap mereka apakah setuju atau tidak dengan langkah atau manuver politik dari kedua kontestan Pilpres 2019 tersebut. Di Bangkalan dan Surabaya, proporsi yang setuju semakin besar dibanding proporsi ketika diminta menjawabi pertanyaan etika politik di atas. Di Sidoarjo, meski masih berbagi dukungan yang setara, tetapi persentasenya juga ikut menguat menjadi 38,1%.

Proporsi yang cukup dominan secara kuantitatif tersebut kemudian juga membuka informasi baru dari data lapangan yang menyebutkan bahwa tidak keseluruhan rakyat atau pendukung dari masing-masing kontestan Pilpres 2019 yang merasa nyaman dan senang dengan adanya koalisi antara dua pihak yang semula menjadi rival politik untuk bekerjasama dalam satu kabinet dan pemerintahan. Mayoritas informan, antara 65,6% hingga 78,3%, membaca dan mengidentifikasi

bahwa ketidaksetujuan tersebut benar-benar ada di tengah-tengah masyarakat (Gambar 6). Sekalipun ketika ditanya terkait perasaan kecewa di kalangan pendukung dari dua kontestan Pilpres 2019 tersebut hal ini, Sidoarjo dan Bangkalan masih mencatatkan persentase di atas 50% yang mengaku mengidentifikasi bahwa pendukung dua kontestan mengungkap kekecewaannya. Sementara yang di Surabaya, meski masih mayoritas, tetapi angka persentasenya masih di bahwa separuh, yakni hanya 46,9%.

Menariknya adalah bahwa para informan kemudian menyadari dan mampu memberi penilaian bahwa langkah politik koalisi atau kerjasama politik dalam pemerintahan di antara kedua kontestan Pilpres 2019 tersebut ternyata berdampak politik. Terutama dalam mengganjal persebaran ancaman perpecahan dan memperkokoh ikatan persatuan antar anak bangsa. Lepas dari sikap mereka yang semula sebagian menyatakan bahwa aksi atau manuver politik tersebut tidak diperkenankan dilakukan baik secara logis maupun etis.

Hal lain yang juga mengemuka adalah tentang kepentingan yang bermain atau setidaknya diuntungkan dari adanya manuver politik tersebut. Surabaya dan Bangkalan tampaknya bersepakat untuk berbaik sangka bahwa ternyata warga di kedua daerah tersebut mayoritasnya, di atas 55%, berpendapat jika motif pokoknya adalah memang diabdikan untuk bangsa dan kesatuannya. Sebaliknya, bagi Sidoarjo, mayoritasnya (meski tidak sampai angka persentase 50%), adalah motif kepentingan bauran antara ihwal mulia untuk mengabdi kepada bangsa dan negara bersama dengan ihwal personal sebagai seorang elit. Dari data lapangan/keuisioner didapati bahwa lebih dari sepertiga informan (38,1%), Sidoarjo menjadikan kepentingan elit sebagai panglimanya.

Proporsi serupa dari peta ketiga kabupaten/kota ini dijumpai ketika pertanyaan ihwal tersebut dikaitkan atau dihubungkan dengan keterwakilan kepentingan wong cilik di dalamnya. Di Surabaya dan Bangkalan, meski kurang dari 50%, tetapi mayoritas (antara 40,66% - 4,7%) tetap menyatakan bahwa langkah politik

tersebut tetap menyertakan motif untuk memperjuangkan kepentingan wong cilik. Sedangkan di Sidoarjo, lebih dari separuh, 57,1% menyatakan bahwa kepentingan wong cilik tidak terakomodasi dalam manuver politik tersebut.

Ingatan dan Preferensi Politik

Preferensi politik mengacu pada pilihan, keyakinan, dan afiliasi individu atau kolektif yang dipegang orang mengenai berbagai masalah politik, partai, kandidat, kebijakan, dan ideologi. Preferensi ini memainkan peran penting dalam membentuk perilaku politik, pengambilan keputusan, dan keterlibatan dalam masyarakat. Adapun faktor yang mempengaruhi terbentuknya suatu preferensi politik tidaklah tunggal. Salah satu yang tak bisa diabaikan adalah faktor ideologi.

Preferensi politik sering kali berakar pada keyakinan ideologis, yang merupakan kerangka menyeluruh yang memandu pandangan individu tentang pemerintah, masyarakat, ekonomi, dan hak individu. Ideologi umum termasuk konservatisme, liberalisme,

sosialisme, dan libertarianisme. Ideologi politik dengan begitu bisa dipahami sebagai sekumpulan ide, keyakinan, nilai, dan prinsip yang memberikan kerangka komprehensif untuk memahami dan mengatasi masalah politik, sosial, ekonomi, dan moral dalam suatu masyarakat. Ideologi menawarkan cara untuk memahami dunia, memandu perilaku politik, dan menginformasikan keputusan kebijakan. Ideologi yang berbeda menawarkan perspektif yang berbeda pada peran pemerintah, distribusi sumber daya, hak individu, dan keadilan sosial.

Sebagian ideologi, misalnya, berbeda dalam keyakinan mereka tentang peran pemerintah. Beberapa menganjurkan intervensi pemerintah yang terbatas (libertarianisme), sementara yang lain menekankan peran yang lebih aktif dalam mengatasi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi (sosialisme). Terkait ekonomi, ideologi juga bervariasi dalam pendekatan mereka terhadapnya. Ideologi kapitalis memprioritaskan kepemilikan pribadi dan pasar bebas, sementara ideologi sosialis dan komunis mendukung berbagai tingkat

kepemilikan kolektif dan redistribusi kekayaan. Kemudian terkait keseimbangan antara hak individu dan kebaikan kolektif. Liberalisme, misalnya, menekankan kebebasan individu, sedangkan ideologi sosialis mengutamakan kesetaraan sosial. Ideologi dapat pula mencerminkan beragam nilai sosial, termasuk yang terkait dengan agama, keluarga, peran gender, dan identitas budaya. Nilai-nilai ini memengaruhi pandangan tentang isu-isu seperti aborsi, hak LGBTQ+, dan pendidikan.

Secara umum, ideologi kerap muncul sebagai tanggapan atas peristiwa sejarah, kondisi sosial, dan tantangan ekonomi. Misalnya, Marxisme muncul sebagai tanggapan terhadap kapitalisme industri abad ke-19. Maka tidak tertutup pintu bagi suatu ideologi dapat beradaptasi dan berkembang seiring waktu dan seiring perubahan masyarakat. Misalnya, liberalisme modern telah berevolusi dari liberalisme klasik untuk mengakomodasi realitas sosial dan ekonomi baru. Jadi, meskipun label ideologis memberikan deskripsi singkat, keyakinan politik yang sebenarnya sering kali lebih

bernuansa dan dapat bervariasi bahkan dalam suatu ideologi. Di Indonesia, pemain utama politik praktis atau politik kekuasaan masihlah partai politik. Di mana partai politik ini sering kali sejalan dengan ideologi tertentu, meskipun partai juga dapat memasukkan unsur berbagai ideologi untuk menarik pemilih yang lebih luas. Sementara dalam diskursus tentang ideologi, maka hal ini sering diletakkan pada spektrum yang bisa menunjukkan rentang perbedaan atau juga kesamaan. Seperti misalnya, ideologi yang lebih liberal atau progresif di satu sisi dan ideologi yang lebih konservatif di sisi lain. Penempatan ideologi pada spektrum ini dapat bervariasi menurut wilayah dan konteks.

Memahami ideologi politik tentu sangat penting untuk menganalisis debat politik, proposal kebijakan, dan pola pemungutan suara. Perbedaan ideologis membentuk bagaimana masyarakat mengatasi tantangan, membuat keputusan kebijakan, dan menentukan kontrak sosial antara individu dan pemerintah mereka. Berikut adalah beberapa referensi utama yang memberikan wawasan komprehensif

tentang berbagai ideologi politik yang suka atau tidak suka, wong cilik juga berkepentingan dengannya: (1) *Communist Manifesto* oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Teks dasar Marxisme ini menguraikan prinsip-prinsip komunisme, menangani perjuangan kelas, kapitalisme, dan jalan menuju masyarakat tanpa kelas. Karya ini menghadirkan kritik terhadap masyarakat kapitalis dan menyerukan kelas pekerja untuk bersatu dan menggulingkan borjuasi; (2) *The Road to Serfdom* oleh Friedrich Hayek (1944). Karya ini mengadvokasi liberalisme klasik dan memperingatkan bahaya kolektivisme dan intervensi pemerintah dalam ekonomi. Hayek berpendapat bahwa jalan menuju kontrol pemerintah yang luas atas ekonomi dan masyarakat menyebabkan hilangnya kebebasan individu dan, pada akhirnya, totalitarianisme; (3) *The Conscience of a Conservative* oleh Barry Goldwater (2007). Buku ini mewakili prinsip-prinsip konservatisme Amerika modern dan membahas pemerintahan yang terbatas, pasar bebas, dan kebebasan individu. Goldwater memainkan peran penting dalam membentuk gerakan

konservatif modern di Amerika Serikat. Karyanya membantu memperkuat prinsip-prinsip konservatif dan memberikan titik temu bagi individu yang berpikiran sama; (4) *The Second Sex* oleh Simone de Beauvoir (1949). Teks feminis ini secara kritis mengkaji konstruksi sosial peran gender dan bagaimana perempuan secara historis terpinggirkan. Buku ini dianggap sebagai teks dasar dalam filsafat feminis dan mengeksplorasi dimensi sosial, sejarah, psikologis, dan eksistensial dari penindasan perempuan. Ini mengkritik cara-cara di mana perempuan secara historis didefinisikan dan dibatasi oleh masyarakat patriarkal; (5) *The Communist Hypothesis* oleh Alain Badiou (2015) yang menawarkan perspektif kontemporer tentang komunisme, membahas relevansi dan potensinya di dunia saat ini. Dalam karya ini, Badiou terlibat dengan konsep komunisme sebagai ide yang berkelanjutan dan vital, terlepas dari kegagalan sejarah berbagai rezim komunis. Dia menegaskan kembali pentingnya komunisme sebagai proyek politik dan filosofis radikal yang bertujuan untuk mengatasi kapitalisme dan

menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata; (6) *A Theory of Justice* oleh John Rawls (1971). Karya ini menyajikan teori keadilan yang komprehensif yang berupaya mengatasi masalah keadilan distributif dan kerja sama masyarakat. Rawls berpendapat bahwa masyarakat yang adil adalah masyarakat di mana prinsip-prinsip keadilan berasal dari proses yang adil. Dia menolak utilitarianisme dan berfokus pada distribusi barang sosial dan ekonomi untuk memastikan hasil yang adil; (7) *The Shock Doctrine* oleh Naomi Klein (2008) yang mengkritik kebijakan ekonomi neoliberal dan mengeksplorasi bagaimana kebijakan tersebut diberlakukan di negara-negara selama masa krisis. Klein berpendapat bahwa saat-saat syok, baik yang disebabkan oleh bencana alam, pergolakan politik, atau krisis ekonomi, menciptakan rasa disorientasi dan kerentanan dalam masyarakat. Keadaan shock ini dimanfaatkan oleh para elit untuk mendorong melalui agenda ekonomi pilihan mereka; (8) *The Structure of Scientific Revolutions* oleh Thomas S. Kuhn (1996). Meski tidak secara eksklusif tentang ideologi politik, buku ini

memperkenalkan konsep pergeseran paradigma dan bagaimana pandangan dunia yang dominan berubah dari waktu ke waktu. Kuhn memperkenalkan konsep "pergeseran paradigma," yang mewakili perubahan radikal dalam cara ilmuwan memahami dunia. Pergeseran paradigma terjadi ketika kerangka ilmiah baru (paradigma) menggantikan yang sebelumnya karena anomali dan tantangan yang tidak dapat diatasi oleh paradigma lama; (9) *The Wretched of the Earth* oleh Frantz Fanon (2005). Karya ini mengeksplorasi dampak psikologis dan sosial dari penjajahan, serta potensi dekolonisasi dan pembebasan; (10) *The Subjection of Women* oleh John Stuart Mill dan Harriet Taylor Mill (1869). Esai ini memperjuangkan kesetaraan wanita dan menantang norma gender tradisional; dan (11) *The Theory of Communicative Action* oleh Jürgen Habermas (1981). Di sini, teori kritis dan rasionalitas komunikatif, menangani isu-isu kekuasaan, wacana, dan demokrasi dikupas. Beberapa referensi ini menawarkan titik awal untuk menggali teks-teks dasar dan ide-ide kunci yang terkait dengan berbagai ideologi politik. Bagaimanapun

perlu diingat bahwa daftar tersebut mencakup berbagai ideologi dan perspektif, yang mencerminkan keragaman pemikiran politik.

Sementara terkait faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi politik wong cilik bisa dinyatakan cukup beragam. Pertama, afiliasi partai. Banyak orang menyelaraskan diri dengan partai politik tertentu yang berbagi nilai dan preferensi kebijakan mereka. Afiliasi partai memengaruhi perilaku memilih, dukungan kebijakan, dan aktivisme politik. Afiliasi partai mengacu pada asosiasi formal seseorang dengan partai politik. Ini menunjukkan partai politik mana yang mengidentifikasi dan mendukung seseorang. Partai politik adalah organisasi yang bertujuan untuk mempromosikan ideologi, kebijakan, dan kandidat tertentu untuk mendapatkan kekuatan politik dan mempengaruhi keputusan pemerintah. Di banyak negara dengan sistem demokrasi, partai politik memainkan peran penting dalam membentuk lanskap politik. Mereka menyediakan cara bagi warga negara untuk secara kolektif mengekspresikan pandangan mereka dan

mempengaruhi arah kebijakan publik. Partai-partai sering menghadirkan *platform*—serangkaian posisi dan tujuan kebijakan—yang mereka anjurkan selama pemilu dan saat menjabat. Penting untuk diperhatikan bahwa afiliasi partai dapat berubah dari waktu ke waktu berdasarkan perubahan keyakinan seseorang atau sebagai respons terhadap keadaan politik yang berubah. Beberapa individu mungkin berafiliasi dengan partai politik seumur hidup mereka, sementara yang lain mungkin berpindah afiliasi berkali-kali.

Preferensi berdasar afiliasi partai politik ini sebenarnya secara teoritik bisa dijelaskan baik dari berbagai perspektif: (1) identifikasi psikologis. Orang cenderung mengidentifikasi dengan partai politik yang sejalan dengan konsep diri dan nilai-nilai mereka. Individu memilih pihak yang mencerminkan keyakinan dan emosi pribadi mereka, membuat mereka merasa memiliki dan menjadi bagian dari identitas diri; (2) Identitas sosial. Orang memilih afiliasi partai berdasarkan identitas sosial mereka. Individu cenderung bersekutu dengan pihak-pihak yang mewakili kelompok

sosial, budaya, etnis, atau agama mereka, karena hal itu menumbuhkan rasa solidaritas dan kepentingan bersama; (3) Disonansi kognitif. Individu dapat berafiliasi dengan partai politik untuk mengurangi disonansi kognitif—ketidaknyamanan mental yang disebabkan oleh keyakinan yang bertentangan. Dengan bergabung dengan sebuah partai, individu menyelaraskan keyakinan mereka sendiri dengan platform partai; (4) Sosialisasi. Ada peran keluarga, pendidikan, media, dan kelompok sebaya dalam membentuk afiliasi partai politik individu. Orang-orang dipengaruhi oleh pengasuhan dan paparan mereka terhadap ide dan informasi politik sejak usia dini (Hart, 2016); (5) Pengaruh sosial. Orang memilih afiliasi partai agar sesuai dengan pendapat dan preferensi jaringan sosial mereka. Tekanan teman sebaya dan interaksi sosial dapat sangat memengaruhi pilihan politik seseorang (Zaler, 1992); (6) Alasan ekonomi. Individu berafiliasi dengan partai berdasarkan kepentingan ekonomi mereka. Pemilih memilih partai yang mereka yakini paling baik untuk kesejahteraan ekonomi mereka, seperti melalui kebijakan yang berkaitan dengan perpajakan, penciptaan lapangan kerja, dan distribusi

pendapatan (Downs, 1957); (7) Pilihan rasional. Mengasumsikan bahwa individu memilih dan berafiliasi dengan partai berdasarkan kepentingan pribadi mereka. Orang membuat pilihan rasional dengan memilih partai yang paling sesuai dengan preferensi kebijakan mereka (Shepsle, 1972; Page & Shapiro, 1992); (8) Masalah valensi. Individu berafiliasi dengan pihak yang dianggap kompeten dalam menangani isu-isu kunci, seperti ekonomi, keamanan nasional, atau kesehatan masyarakat. Pemilih memprioritaskan kompetensi partai daripada posisi kebijakan tertentu (Campbell, 1980; Johns, 2011); (9) Faktor generasi. Afiliasi partai individu dipengaruhi oleh pengalaman dan peristiwa generasi mereka. Peristiwa sejarah dan perubahan masyarakat dapat membentuk nilai dan prioritas generasi yang berbeda, membuat mereka selaras dengan pihak tertentu (Jennings & Niemi, 1981; Strauss & Howe, 1997). Penting untuk dicatat bahwa teori-teori ini sering berinteraksi dan tumpang tindih, dan afiliasi partai individu biasanya dipengaruhi oleh kombinasi faktor. Selain itu, konteks politik, perbedaan budaya, dan

keadaan spesifik setiap individu dapat menyebabkan variasi dalam penerapan teori-teori ini dalam praktik.

Preseden Politik di 2024

Paparan data lapangan sebelumnya sebenarnya cukup memberi gambaran serta konteks mengenai bagaimana peta persepsional rakyat dari ketiga kabupaten/kota tersebut. Data tersebut juga menjadi fakta yang memberi informasi bagaimana realitas ingatan kolektif wong cilik terkait peristiwa sejarah politik di 2019 lalu. Selanjutnya, penelitian juga telah memanen data dari lapangan mengenai persoalan konsekuensial dari peristiwa Pilpres 2019 dengan partisipasi politik rakyat dalam Pemilu 2024 mendatang. Yakni menyoal apakah peristiwa Pilpres 2019 yang mencatatkan fenomena unik dalam dunia politik tersebut bisa menjadi preseden yang berpengaruh dalam sikap dan perilaku politik rakyat di Pemilu 2024.

Ternyata asumsi dan kekhawatiran bahwa peristiwa ‘perkawinan politik’ antar rival kontestan Pilpres 2019 tidak berdampak signifikan terhadap

keinginan rakyat untuk tetap berpartisipasi aktif dalam perhelatan demokrasi dalam bentuk pemilihan umum maupun pemilihan presiden/wakil presiden di 2024 mendatang. Lebih dari 93% menyatakan tetap akan ikutserta dalam pemungutan suara.

Bahkan, di Sidoarjo dan Bangkalan, mayoritas mereka juga mengemukakan bahwa peristiwa tersebut tidak akan mempengaruhi sikap dan tindakan mereka untuk aktif dalam kehidupan politik kebangsaan sebagai warga negara. Hanya di Surabaya, dengan angka persentase cukup besar, 62,5% yang menyatakan peristiwa tersebut akan memberi pengaruh dalam sikap dan tindakan partisipatif mereka dalam pemilu mendatang.

Ketika digali lebih dalam mengenai faktor determinan dan paling menentukan yang sekiranya nanti akan berpengaruh pada keputusan untuk ikutserta dan menggunakan hak pilih dalam Pilpres 2024, ternyata mayoritas menyatakan adalah faktor pertimbangan pribadi. Sebagian memang ada yang menyatakan pertimbangan pragmatis berupa 'uang saku' *(money*

politics) sebagai faktor penentu, lalu sebagiannya lagi pertimbangan afiliasi partai, tetapi persentasenya sangat kecil. Demikian pula yang secara tegas menyatakan untuk memilih golput di perhelatan pemilu 2024 mendatang, sangat minoritas, tak melampaui angka 5%. Di Surabaya bahkan persentasenya 0% untuk pilihan golput.

BAB 4
Simpulan

Berdasarkan data, fakta, dan analisis teoritik membahas data dan fakta terkait ingatan sejarah kolektif wong cilik tentang kontestasi elektoral 2019 dan presedennya bagi pemilu 2024, maka dapatlah ditarik beberapa simpulan bahwa beberapa peristiwa penting dalam Pilpres 2019 telah menjadi bagian dari ingatan sejarah kolektif rakyat. Di antaranya terkait munculnya kekhawatiran segregasi di akar rumput yang bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa karena perbedaan pilihan dukungan politik. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah ingatan terkait koalisi atau kerjasama politik dalam pemerintahan antara dua pasangan kontestan yang semula menjadi rival.

Wong cilik bukanlah individu yang emosional dalam pilihan politiknya. Mereka memiliki kesadaran dan sekaligus penilaian baik secara logis maupun etis terkait langkah politik elite pasca Pilpres 2019. Keragaman yang cukup terlihat terkait penilaian mereka
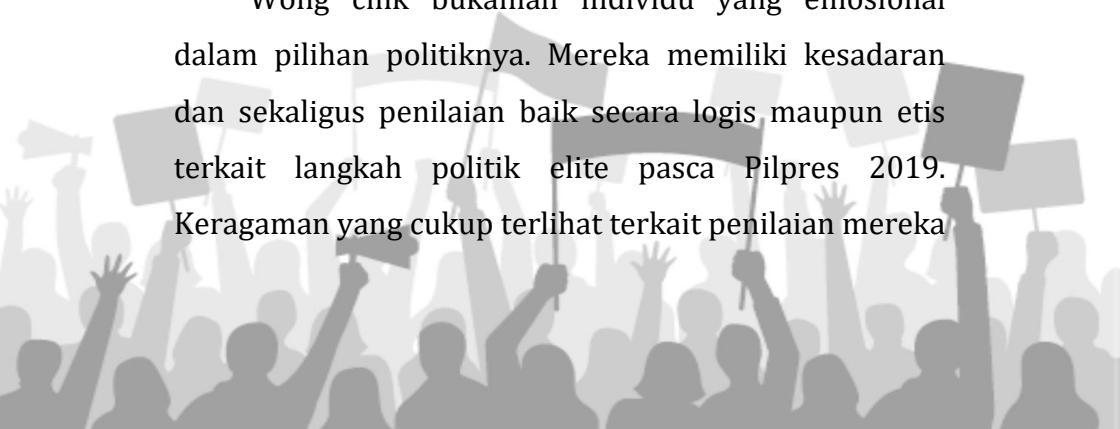
ternyata tidak cukup signifikan mempengaruhi keinginan mereka untuk tetap aktif berpartisipasi dalam pemilu berikutnya. Artinya, dapat dikatakan bahwa kepercayaan mereka terhadap sistem demokrasi elektoral di Indonesia masih tinggi sehingga pandangan dan sikap kritis mereka terhadap kekurangan-kekurangan yang masih ada dalam praktik pemilu sebelumnya tidak menjadikan mereka menjadi antipati atau setidaknya putus asa dan tidak percaya pada produk-produk demokrasi. Mereka tampaknya masih memiliki harapan besar pada masa depan praktik berdemokrasi di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam rekomendasi yang mereka bisa pikirkan untuk pemilu yang akan datang. Temuan ini tentu bisa berkontribusi dalam pengembangan teoritik maupun praktik penyusunan kebijakan politik di Indonesia. Bahwa kedewasaan berpolitik, melalui ragam bentuk proses interaksi maupun transformasinya, secara bertahap telah berkembang tidak hanya di tingkatan elite, tetapi juga di tingkatan akar rumput.

Jika mempertimbangkan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pilihan demokrasi dalam politik saat ini yang masih sangat tinggi; sementara alternatif konstitusional yang bisa menjadi pilihan lebih baik dari demokrasi untuk mengelola kontestasi politik di negeri ini secara rasional dan berkeadaban juga belum ada, maka seluruh pemangku kepentingan politik nasional seharusnya mampu mengelola tren ini agar terus menguat melalui praktik berdemokrasi yang semakin mengindahkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi itu sendiri. Akhirnya, proses demokrasi di tanah air harus tetap menaruh perhatian besar dan sangat serius terhadap isu-isu kerakyatan. Praktik politik yang menjauhkan diri dari aspirasi kepentingan massa rakyat bisa memantik preseden yang tidak dikehendaki. Catatan sejarah di banyak negara, termasuk di negeri sendiri harus menjadi cermin dan ingatan yang tidak boleh dilupakan. Karena seperti disebutkan dalam suatu adagium, siapa yang melupakan sejarah, akan terjerumus dalam pengulangan kesalahan atau keterpurukan yang serupa.

INDEKS

DAFTAR PUSTAKA

Adnan. 2014. "Wajah Revolusi Indonesia dalam Perspektif Filsafat Sejarah", *Farabi,* 11 (1): 24-35.

Alvin, Silvanus. 2019. "Manajemen Citra Politik Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno Melalui Akun @Prabowo dan @Sandiuno", *Komunika,* 13 (2).

Amelia, Avita et.al. 2020. "Perubahan Pilihan Santri Gresik pada Pilpres 2019", *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik,* 2 (2): 146-151.

Amir, Mushaddiq. 2020. "Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia", *Al-Ishlah,* 23 (2), https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.41.

Andre, Claire & Velasquez, Manuel. 2015. "World Hunger: A Moral Response", *Markkula Center for Applied Ethics at Santa Clara University.* URL: https://www.scu.edu/ethics/focus-areas/more-focus-areas/resources/world-hunger-a-moral-response/.

Arifianto, Alexander R. 2022. "2024 Election Shaping Up as a Four-Horse Race, as Elite Manoeuvring Intensifies", *Indonesia at Melbourne,* the University of Melbourne, https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/2024-election-shaping-up-as-a-four-horse-race-as-elite-manoeuvring-intensifies/ (9 Agustus 2022).

Assiddiq, Dafis Ubaidillah dan Ambarwati, Dewi. 2021. "Strategi Komunikasi Politik Tim Kampanye Daerah Joko Widodo – K.H. Ma'ruf Amin Provinsi Jawa Timur dalam Pemenangan Piplres 2019", *Jurnal Nomosleca,* 7 (2): 107-117.

Assmann, Jan & Assmann, Aleida. 2010. *Memory in a Global Age: Discourses, Practices, and Trajectories.*

_____. 2011. *Cultural Memory and Western Civilization: Functions, Media, Archives.*

Ayoob, Mohammed. 2002. "Inequality and Theorizing in International Relations: The Case for Subaltern Realism", *International Studies Review,* 4 (3): 27-48.

Badiou, Alain. 2015. *The Communist Hypothesis.* London: Verso Books.

Baharuddin, Tawakkal et.al. 2022. "Prediction of Indonesian Presidential Candidates in 2024 Using Sentiment Analysis and Text Search on Twitter", *International Journal of Communication and Society,* 4 (2).

Benda, Harry J. & McVey, Ruth T. 2009. *The Communist Uprisings of 1926-1927 in Indonesia: Key Documents*. Sheffield: Equinox Publishing.

Bessen, David M. 2012. "The Jacquerie: class war or co-opted rebellion?" (pp. 43-59), *Journal of Medieval History*, Vol. 11, 1Issue 1.

BLM. 2023. *About Black Lives Matter.* URL: https://blacklivesmatter.com/about/.

Bottero, Wendy. 2005. *Stratification: Social Division and Inequality.* London & New York: Routledge.

BPS. 2022. *SUSENAS.* Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Brown, Megan. 2017. "The $15 Wage Movement Moves South: Politics of Region in Labor Union Campaigns" (pp. 846-863), *Antipode*, Vol. 50, Issue 4. DOI: https://doi.org/10.1111/anti.12377.

Bryson, Valerie. 2007. *Gender and the Politics of Time: Feminist Theory and Contemporary Debates.* Bristol: Policy Press.

Bubandt. 2014. *Democracy Corruption and the Politics of Spirits in Contemporary Indonesia.* Abingdon: Routledge.

Bynum, Elliott et.al. 2021. "France: The Yellow Vest Movement" (pp. 3-5), *Political Disorder in Europe: 10 Cases From Acled's New Expansion*. URL: https://www.jstor.org/stable/resrep28647.4.

Campbell, Angus. 1980. *The American Voters.* Chicago: University of Chicago Press.

Carter, Miguel. 2010. "The Landless Rural Workers Movement and Democracy in Brazil" (pp 186-217), *Latin American Research Review.* URL: https://www.jstor.org/stable/27919219.

Célestine, Audrey. 2022. "Introduction - Black Lives Matter: A Transnational Movement", *Esclavages & Post-esclavages,* Vol. 6. URL: http://journals.openedition.org/slaveries/6664

Choi, Heeseung. 2001. "Cultural Marginality: A Concept Analysis with Implications for Immigrant Adolescents" (pp 193-206), *Issues in Comprehensive Pediatric Nursing,* Vol. 24. DOI: https://doi.org/10.1080/014608601316942559.

Corning, Amy & Schuman, Howard. 2015. *Generations and Collective Memory.* Chicago: University of Chicago Press.

Creswell, J.W. (2014). *Research Desgn: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (Fourth Edition).* LA: Sage.

Dasgupta, Biplab. 1978. "The Naxalite Movement: An Epilogue" (pp. 3-24), *Social Scientist,* Vol. 6, No. 12.

Delgado & Stefancic, 2001. *Critical Race Theory: An Introduction.* New York: New York University Press.

Deveaux, 2015. "The Global Poor as Agents of Justice" (pp. 125-150), *Journal of Moral Philosophy,* Vol. 12. DOI: 10.1163/17455243-4681029.

Dinata, Ari Wirya dan Akbar, M. Yusuf. 2022. "Mitigation of Indonesia Concurrent Election Dispute Settlement in 2024", *Proceedings of the Universitas Lampung International Conference on Social Sciences (ULICoSS 2021),* https://dx.doi.org/10.2991/assehr.k.220102.055.

Downs, Anthony. 1957. "An Economic Theory of Political Action in a Democracy" (pp. 135-150), *Journal of Political Economy,* Vol. 5, No. 2.

Dubois, A. & Gadde, L.E., (2002), "Systematic Combining: an Abductive Approach to Case Research", *Journal of Business Research*, Vol. 55, No. 5, pp. 553-560.

Durrah, Fara Inka, Anwar, Samsul, dan Siregar, Latifah Rahayu. 2020. "Markov Chain Analysis, Metode Alternatif dalam Mengukur Tingkat Elektabilitas Peserta Pemilu Melalui Tagar: Kasus Pemilihan Presiden Indonesia Tahun 2019", *Jurnal Wacana,* 5 (1): 41-57.

Emmison, Michael. 2003. "Social Class and Cultural Mobility: Reconfiguring the Cultural Omnivore Thesis" (pp. 211-230), *Journal of Sociology,* Vol. 39 (3).

Engels, Frederick. 1850. *The Peasant War in Germany.* Cologne: Neue Rheinische Zeitung.

Fadiyah, Dina dan Simorangkir, Jimmy. 2021. "Penggunaan Media Sosial Instagram dalam Membangun Citra Positif Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019", *Journal of Political Issues,* 3 (1): 13-27.

Fanon, Frantz. 2005. *The Wretched of the Earth.* New York: Grove Press.

Fermana, Riyan Alghi dan Zetra, Aidinil. 2022. "Relasi Media Massa dan Politik pada Pemilihan Umum Presiden 2019", *Jurnal Wacana Politik,* 7 (1): 71-83.

Finney, Patrick B. 2014. "The Ubiquitous Presence of the Past? Collective Memory and International History", *International History Review,* 36 (3): 443-472, https://doi.org/10.1080/07075332.2013.828646.

Foucoult, Michel. 1995. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison.* NY: Vintage Books.

Gautama, Mohammad Isa. 2020. "Voter Attitudes toward Hoax Information Sourves at the 2019 Presidential Election in West Sumatra", *Mediator,* 13 (1): 99-110.

Goldwater, Barry. 2007. *The Conscience of a Conservative.* Princeton: Princeton University Press.

Greenberg, Lawrence M. 1986. *The Hukbalahap Insurrection: A Case Study of a Successful Anti-Insurgency Operation in the Philippines, 196-1955.* Washington: US Army Center of Military History.

Guha, Sumit. 2019. "History Between Memory and Reconstruction", *Not Even Past,* http://notevenpast.org/history-between-memory-and-reconstruction/.

Haba, John. 2011. "Bangsa Pelupa dan Pendek Ingatan", *https://www.adonaranews.com/2011/05/bangsa-pelupa-dan-pendek-ingatan.html* (25 Mei 2011).

Habermas, Jurgen. 1981. *The Theory of Communicative.* Boston: Beacon Press.

Halbwachs, Maurice. 1992. *On Collective Memory.* Chicago: The University of Chicago Press.

_____. 2023. *The Social Frameworks of Memory*. Oxford: Oxford University Press.

Haris, Abdul dan Dardum, Abdulloh. 2021. "Kiai NU dan Politik: Keterlibatan Kiai NU Jember dalam Konstestasi Pilpres 2019", *Fenomena,* 20 (1): 91-114.

Hart, Austin. 2016. *Economic Voting: A Campaign-Centered Theory.* Cambridge: Cambridge University Press.

Harvey, Neil. 1998. *The Chiapas Rebellion: The Struggle for Land and Democracy.* Durham: Duke University Press Books.

Helmsing, Mark. 2021. *Historical Memory: What Is it Good For?,* https://ncheteach.org/post/Historical-Memory-What-Is-it-Good-For (1 September 2021).

Hergianasari, Putri dan Netanyahu, Kurniawan. 2021. "The Transformation of Radical Movement in Yogyakarta post-2019 Presidential Election", *Jurnal Sosiologi Walisongo,* 5 (1): 93-108.

Hess, Andreas. 2001. *Concepts of Social Stratification: European and American Models.* New York: Palgrave.

Hirsch, Marianne & Spitzer, Leo. 2010. *Ghosts of Home: The Afterlife of Czernowitz in Jewish Memory.* Woodbury: Llewellyn Worldwide.

Hirsch, Marianne. 1997. *Family Frames: Photography Narrative and Postmemory.* Cambridge: Harvard University Press.

_____. 2012. *The Generation of Postmemory: Writing and Visual Culture After the Holocaust.* New York: Columbia University Press.

Hirst, William and Manier, David. 2008. "Towards a psychology of collective memory", *Memory,* 16 (3): 183–200, http://doi.org/10.1080/09658210701811912.

Hobsbawm, Eric & Ranger, Terence. 1992. *The Invention of Tradition.* Cambridge: Cambrige University Press.

Hodgson, Dorothy L. 2002. "Introduction: Comparative Perspectives on the Indigenous Rights Movement in Africa and the Americas" (pp. 1037-1049), *American Anthropologist,* New Series, Vol. 104, No. 4. URL: http://www.jstor.org/stable/3567094?origin=JSTOR-pdf.

Hooks, Bell. 1990. "Marginality as a Site of Resistence" (pp. 341-343), in Ferguson, R. et.al. eds. *Out There: Marginalization and Contemporary Cultures.* Cambridge Mass: MIT Press.

Hoskins, Andrew. 2004. "Television and the Collapse of Memory", *Time & Society,* Vol. 13, No. 1.

Indrawan, Jerry, Ilmar, Anwar, dan Kusuma, Ardli Johan. 2022. "Rekonsiliasi Politik Pasca Pilpres 2019: Menumbuhkan Semangat Kabangsaan dalam Konstruksi Sosial Budaya", *Journal of Political Issues,* 4 (1).

Iswandi dan Abdullah, Gibran. 2020. "Religious Issues in the 2019 Presidential Election of Indonesia", *Jurnal Al-Dustur,* 3 (1): 1-21.

James, Wilmot G. 1987. "Grounds for a Strike: South African Gold Mining in the 1940s" (pp. 1-22), *African Economic History*, No. 16. DOI: https://doi.org/10.2307/3601267.

Jennings, M. Kent & Niemi, Richard G. 1981. *Generations and Politics: A Panel Study of Young Adults and Their Parents.* Princeton: Princeton University Press.

Johns, Robert. 2011. "Credit Where it's Due? Valence Politics, Attributions of Responsibility, and Multi-Level Elections" (pp 57-77), *Political Behavior,* Vol. 33, No. 1.

Joshi, Khyati Y. 2020. *White Christian Priviledge: The Illusion of Religious Equality in America.* NY: NYU Press.

Kaligis, Rator. 2014. "Nasionalisme dan Kelas Sosial: Ideologi dan Praktik Partai Nasionalis di Indonesia", *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik,* 27 (2): 77-90.

Kartodirdjo, Sartono. 2015. *Pemberontakan Petani Banten.* Jakarta: Komunitas Bambu.

Keegan, S. (2009). *Qualitative Research: Good Decision Making Through Understanding People, Culture and Markets.* London: Kogan Page.

Kemendikbud. 2017. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kelima.* Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Khanna, Pragya. 2011. "Making Labour Voices Heard During an Industrial Crisis: Workers' Struggles in the

Bangladesh Garment Industry" (pp. 106-129), *Labour, Capital and Society,* Vol. 44, No. 2. https://www.jstor.org/stable/43158407.

Klein, Naomi. 2008. *The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism.* London: Picador.

Knight, Kyle. 2018. "Indonesia's Anti-Gay Drive Should Concern All Asia", *Nikkei Asia.* URL: https://asia.nikkei.com/Viewpoints/Kyle-Knight/Indonesia-s-anti-gay-drive-should-concern-all-Asia.

Kohar, Abdul. 2021. "Ingatan Pendek Bahaya Bencana", https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/2114-ingatan-pendek-bahaya-bencana (7 April 2021).

Kubow, Magdalena. 2013. "The Solidarity Movement in Poland: Its History and Meaning in Collective Memory", *The Polish Review,* Vol. 58, No. 2. DOI: https://doi.org/10.5406/polishreview.58.2.0003.

Kuhn, Thomas S. 1996. *The Structure of Scientific Revolutions.* Chicago: University of Chicago Press.

Kurnia, Rahma Kahfi dan Al-Hamdi, Ridho. 2019. "Motif Dukungan Relawan Independen terhadap Elektabilitas Prabowo-Sandi pada Pilpres 2019: Studi atas Gerakan Milenial Indonesia (GMI) Yogyakarta", *Jurnal Politik Profetik,* 7 (2): 229-249.

Kurniawan, Imam dan Susanto, Ajib. 2019. "Implementasi Metode K-Means dan Naïve Bayes Classifier untuk Analisis Sentimen Pemilihan

Presiden (Pilpres) 2019)", *Jurnal Eksplora Informatika,* 9 (1): 1-10.

Kuswono. 2016. "Marhaenism: Social Ideology Created by Sukarno", *Jurnal Historia,* 4 (2): 119-130.

LaCapra, Dominick. 1998. *History and Memory after Auschwitz.* Ithaca: Cornell University Press.

Lavelle, John F. 2011. *Blue Collar, Theoretically: A Post-Marxist Approach to Working Class Literature.* Jefferson: McFarland.

Levy, Daniel & Sznaider, Natan. 2002. "Memory Unbound: The Holocaust and the Formation of Cosmopolitan Memory" (87-106), *European Journal of Social Theory,* Vol. 5, No. 1.

Lichtenstein, Nelson. 1980. "Auto Worker Militancy and the Structure of Factory Life, 1937-1955" (pp. 335-353), *The Journal of American History*, Vol. 67, No. 2. DOI: https://doi.org/10.2307/1890412.

Lowry, Michelle and Nyers, Peter. 2003. "Introduction: Global Movements for Refugee and Migrant Rights" (pp. 2-3), *Refugee: Canada's Journal on Refugees.* URL: https://refuge3.journals.yorku.ca/index.php/refuge/article/download/23481/21677.

Maggio, J. 2007. "Can the Subaltern Be Heard?": Political Theory, Translation, Representation, and Gayatri Chakravorty Spivak", *Alternatives,* 32: 419-443.

Mansoor, Asma. 2015. ""Marginalization" in Third World Feminism: Its Problematics and Theoretical

Reconfiguration", *Palgrave Communication.* DOI: http://dx.doi.org/10.1057/palcomms.2016.26.

Manzo, Lynne C. 2011. "Recognizing the Lived Experience of Place: Challenges to Genuine Participation in Redeveloping Public Housing Communities", in *The Paradox of Urban Space: Inequality and Transformation in Marginalized Communities,* eds. Sharon E. Sutton & Susan P. Kemp. New York: Palgrave Macmillan.

Marshall, Hannah and Drieschova, Alena. 2018. "Post-Truth Politics in the UK's Brexit Referendum", *New Perspectives,* Vol. 26, No. 3. URL: https://www.jstor.org/stable/26675075.

Marx, Karl dan Engels, Friedrich. 1969, Marx/Engels Selected Works. Moscow: Progress Publishers.

Massey, Heath. 2011. "When Are We When We Think? Arendt's Temporal Interpretation of Thinking and Thoughtlessness" (pp. 71-90), *Philosophical Topics,* Vol. 39, No. 2.

Mill, John S. & Mill, Harriet T. 1869. *The Subjection of Women.* London: Longmans, Green, Reader, & Dyer.

Moore-Gilbert, Bart. 1997. *Postcolonial Theory: Contexts, Practices, Politics.* New York: Verso.

Mughni, Abdul. 2015. "Keuangan Islam untuk *Wong Cilik* (Miskin)", *Muqtasid,* 6 (1): 125-139.

Muhtadi, Burhanuddin. 2022a. "Indonesia's 2024 election will pit party elites against popular figures", *Channel News*

Asia, https://www.channelnewsasia.com/commentary/indonesia-2024-president-election-prabowo-ganjar-anies-party-candidate-2883661 (7Agustus 2022).

Muhtadi, Burhanuddin. 2022b. "Indonesia's 2024 Elections: Party Elite Interest Versus Mass Popularity", *Fulcrum,* https://fulcrum.sg/indonesias-2024-elections-party-elite-interest-versus-mass-popularity/ (16 Agustus 2022).

Najib, Ahmad Choirun dan Irsyad, Akhmad. 2019. "Perbandingan Metode Lexico-based dan SVM untuk Analisis Sentimen Berbasis Ontologi pada Kampanye Pilpres Indonesia Tahun 2019 di Twitter", *Fountain of Informatics Journal,* 4 (2): 41-48.

Nasution, Robby Darwis, Harsono, Jusuf, dan Triono, Bambang. 2020. "Persepsi Masyarakat Rural terhadap Profil Calon Presiden dalam Pilpres 2019", *Khazanah Sosial,* 2 (3): 133-140.

Nora, Pierre. 1996. *Realms of Memory: Rethinking the French Past.* New York: Columbia University Press.

Nugroho, Ganjar. 2001. "Resistensi *Wong Cilik* atas Pasar (Alokasi-Konsumsi)", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,* 5 (1): 91-119.

Nurse, Andrew. 2018. "Disjunctures of Public Memory: Remembrance Day in Sackville NB", *Active History,* http://activehistory.ca/2018/11/disjunctures-of-public-memory-remembrance-day-in-sackville-nb/ (8 November 2018).

Olick, Jefery. 2007. *The Politics of Regret: On Collective Memory and Historical Responsibility.* New York & London: Routledge.

Olick, Jeffrey K.; Vinitzky-Seroussi, Vered; Levy, Daniel. 2011. *The Collective Memory Reader.* Oxford: Oxford University Press.

Ouweneel, Arij. 1990. "What Was Behind Mexico's Peasant Revolution?" (pp. 99-115), *European Review of Latin American and Carribean Studies 48.* URL: https://www.jstor.org/stable/25675451.

Owens, Ron. 1996. "A Sketch of the Political Structure of the Republic", *Electronic Antiquity,* Vol. 3, No/ 5. URL: https://scholar.lib.vt.edu/ejournals/ElAnt/V3N5/owens.html.

Oza, Preeti. 2021. "Religion, Culture and the Process of Marginalization", *International Journal of Interreligious and Intercultural Studies,* Vol. 4, No. 2. DOI: https://dx.doi.org/10.32795/ijiis.vol4.iss2.2021.710.

Page, Benjamin I & Shapiro, Robert Y. 1992. *The Rational Public: Fifty Years of Trends in Americans' Policy Preferences.* Chicago: University of Chicago Press.

Pangesti, Mohamad Akbar. 2021. "Memori Kolektif dalam Novel Secangkir Teh Melati", *Jentera,* 10 (2), https://doi.org/10.26499/jentera.v10i2.2010.

Panuju, Redi. 2019. "The Comparison of Jokowi and Prabowo Subianto Exposed on YouTube", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,* 22 (3): 245-258.

Passarelli, Gianluca and Tuorto, Dario. 2016. “The Five Star Movement: Purely a Matter of Protest? The Rise of a New Party Between Political Discontent and Reasoned Voting” (pp. 1-12), *Party Politics.* DOI: https://doi.org/10.1177/1354068816642809.

Petronis, Caroline. 2023. “Disability Rights Movement”, *Social Movements at Duke University.* URL: https://socialmovements.trinity.duke.edu/movements/disability-rights-movement.

Portelli, Alessandro. 1991. *The Death of Luigi Trastulli and Other Stories: Form and Meaning in Oral History.* Albany: State University of New York Press.

Postel, Charles. 2022. “The Populist Movement in the 19th Century”, *American History. https://oxfordre.com/americanhistory/display/10.1093/acrefore/9780199329175.001.0001/acrefore-9780199329175-e-1002.*

Privitt, A.J. 2019. “Is There a Moral Obligation to Help the Poor?”, *Law Journal for Social Justice at Arizona State University.* URL: https://lawjournalforsocialjustice.com/2019/12/09/is-there-a-moral-obligation-to-help-the-poor/.

Ramírez, Cristóbal Valencia. 2005. "Venezuela's Bolivarian Revolution: Who Are the Chavistas?" (pp. 79-97), *Latin American Perspectives*, Vol. 32, No. 3. URL: https://www.jstor.org/stable/30040243.

Rawls, John. 1971. *A Theory of Justice.* Cambridge: Belknap Press.

Ricoeur, Paul. 2004. *Memory, History, Forgetting.* Chicago & London: The University of Chicago Press.

Ristala, Harky. 2019. “Upaya Kesbangpol Kabupaten Cianjur dalam Meminimalisir Konflik pada Masa Persiapan Pilpres dan Wapres Tahun 2019”, *Jurnal Caraka Prabu,* 3 (1).

Robison, Richard & Hadiz, Vedi R., 2004. *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets.* Abingdon: Routledge.

Roediger, Henry L.; Abel, Magdalena. 2015. “Collective memory: a new arena of cognitive study”, *Trends in Cognitive Sciences,* 19 (7): 359–361, https://doi.org/10.1016/j.tics.2015.04.003.

Rolf, David. 2016. *The Fight for Fifteen: The Right Wage for a Working America.* New York & London: The New Press.

Romli, Lili. 2019. “Political Identity and Challenges for Democracy Consolidation in Indonesia”, *Politik Indonesia,* 4 (1): 77-98.

Roth, Kenneth. 2017. “The Dangerous Rise of Populism: Global Attacks on Human Rights Values” (pp. 79-84), *Journal of International Affairs.* URL: https://www.jstor.org/stable/44842604.

Roth, W.M. (2012). *Fist-Person Methods: Toward an Empirical Phenomenology of Experience.* Rotterdam: Sense Publishers.

Rüsen, Jörn. 2008. *History: Narration, Interpretation, Orientation.* New York & Oxford: Berghahn Books.

Said, Edward W. 1979. *Orientalism.* NY: Vintage Books.

Sari, Haryanti Puspa. 2022. *Gerindra: Pak Prabowo Tidak Mau Bangsa Ini Terbelah, Tak Mungkin Perbedaan 01 dan 02 Terus Dipelihara...* https://nasional.kompas.com/read/2022/04/24/11085111/gerindra-pak-prabowo-tidak-mau-bangsa-ini-terbelah-tak-mungkin-perbedaan-01 (24 April 2022).

Sastramidjaja, Yatun, Rasidi, Pradipa P., dan Elsitra,Gita N. 2022. "Peddling Secrecy in a Climate of Distrust: Buzzers, Rumours and Implications for Indonesia's 2024 Elections", *ISEAS-Yusof Ishak Institute,* https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/2022-85-peddling-secrecy-in-a-climate-of-distrust-buzzers-rumours-and-implications-for-indonesias-2024-elections-by-yatun-sastramidjaja-pradipa-p-rasidi-and-gita-n-elsitra/.

Schlauch, Margaret. 1940. "The Revolt of 1381 in England" (pp. 414-432), *Science & Society,* Vol. 4, No. 4.

Schwartz, Arieh. 2018. "Memory and Disjunctivism", *Essays in Philosophy,* 19 (2), http://dx.doi.org/10.7710/1526-0569.1611.

Scotch, Richard K. 1989. "Politics and Policy in the History of the Disability Rights Movement" (pp. 380-400), *The Milibank Quarterly,* Vol. 67, Supplement 2 (Part 2). DOI: https://doi.org/10.2307/3350150.

Scott, James C. 2012. *Decoding Subaltern Politics: Ideology, Disguise, and Resistance in Agrarian Politics.* Routledge.

Scott, Sophia. 2021. “The Battle for Historical Memory”, *Harvard Political Review,* The Battle for Historical Memory - Harvard Political Review (harvardpolitics.com) (21 Juli 2021).

Sharp, Joanne. 2011. “Subaltern Geopolitics: Introduction”, *Geoforum,* 42 (3), pp. 271-273.

Shepsle, Kenneth A. 1972. “The Strategy of Ambiguity: Uncertainty and Electoral Competition” (pp 555-568), *The American Political Science Review,* Vol. 66, No. 2.

Silvera, Alain. 1971. “The French Revolution of May 1968” (pp. 336-354), *The Virginia Quarterly Review*, Vol. 47, No. 3. URL: https://www.jstor.org/stable/26443428.

Simandjuntak, Deasy. 2022. “Looking ahead to Indonesia’s 2024 elections”, *East Asia Forum,* https://www.eastasiaforum.org/2022/06/10/looking-ahead-to-indonesias-2024-elections/ (10 Juni 2022).

Sinkkonen, Teemu. 2015. “The Rise of the Podemos Party in Spain”, *FIIA Comment.* URL: https://www.files.ethz.ch/isn/188379/comment3.pdf.

Smith, Christopher. 2012. "The Origins of the Tribunate of the Plebs" (pp. 101-125), *Antichthon,* 46. DOI:10.1017/S0066477400000162.

Smith, S.A. 2002. *The Russian Revolution: A Very Short Introduction.* Oxford: Oxford University Press.

Spivak, Gayatri Chakravorty. 2010. "Can the Subaltern Speak" (pp. 21-80), in Rosalind C. Morris ed. *Can the Subaltern Speak?: Reflections on the History of an Idea.* NY: Columbia University Press.

Stacks, Don W. & Salwen, Michael B. 2008. *An Integrated Approach to Communication Theory and Research.* Abingdon: Routledge.

Steinhauer, Jason. 2017. "History is not There to Be Liked: On Historical Memory, Real and Fake", *The American Review of Books, Blogs, and Bull,* https://www.fpri.org/article/2017/09/history-not-liked-historical-memory-real-fake/ (15 September 2017).

Strauss, William & Howe, Neil. 1997. *The Fourth Turning: An American Prophecy - What the Cycles of History Tell Us about America's Next Rendezvous with Destiny.* New York: Crown.

Sukarno. 1964. "Mentjapai Indonesia Merdeka", *Di Bawah Bendera Revolusi.* Jakarta: Panitya Penerbit Dibawah Bendera Revolusi.

Sumarno, Nano. 2021. "Studi Netnografi Post-Truth dalam Percakapan Politik Pemilihan Presiden 2019 di Facebook", *Jurnal PIKOM,* 22 (2): 161-176.

Swadhikar. 2015. *Equity Watch: 2015. Access to Justice for Dalits in India.* New Delhi: Swadhikar.

Tajfel, Henri & Turner, John. 1970. *The Social Psychology of Intergroup Relations.*

Tinarbuko, Sumbo. 2019. “Membaca Makna Iklan Politik Pilpres 2019”, *Mudra,* 34 (2): 250-258.

UNESCO. 2010. *Reaching the Marginalized.* Oxford: Oxford University Press.

Urban, Dennis. 2020. *Important Strikes of the late 19th Century*. URL: http://www.drurban.info/uploads/2/4/4/9/24492964/strike_chart.pdf.

Varshney, Ashutosh. 1978. “Structural Functional Approach to Politics: An Evaluative Over-View and Relevance for Research in Developing Countries” (pp. 3066-318), *The Indian Journal of Political Science,* Vol. 39, No. 2.

VOI. 2021. “Needdem: The 2024 Simultaneous Election Is The Most Complicated And Counterproductive”, Needdem: The 2024 Simultaneous Election Is The Most Complicated And Counterproductive (voi.id) (15 Oktober 2021).

Wahdini, Muhammad. 2022. “The Effectiveness of Simultaneous Election 2019: Evaluation through the Simultaneous Election 2024”, *Jurnal Bina Praja,* 14 (1), https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.123-134.

Watson, Denton L. 1993. “Assessing the Role of the NAACP in the Civil Rights Movement” (pp. 453-468), *The Historian,* Vol. 55, No. 3. URL: https://www.jstor.org/stable/24448609.

Wertsch, James V. 1991. *Voices of the Mind: A Sociocultural Approach to Mediated Action.* Cambridge: Harvard University Press.

Wertsch, James V. 1998. *Mind as Action.* New York & Oxford: Oxford University Press.

_____. 2009. "Collective Memory" (pp. 117-137), in *Memory in Mind and Culture,* edited by Pascal Boyer and James V. Wertsch. Cambridge: Cambridge University Press.

White, Hayden. 1973. *Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe.* Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

Williams, Kirk R. & Timberlake, Michael. 1984. "Structured Inequality, Conflict, and Control: A Cross-National Test of the Threat Hypothesis" (pp. 414-432), *Social Forces*, Vol. 63, No. 2. DOI: https://doi.org/10.2307/2579054.

Winarni, Leni, Agussalim, Dafri, dan Bagir, Zainal Abidin. 2020. "Religio-politics of Islamic Group in the Contestation of 2019 Indonesian Presidential Election", *Politik Indonesia,* 5 (1): 22-46.

Winter, Jay. 1995. *Sites of Memory, Sites of Mourning: The Great War in European Cultural History.* Cambridge: Cambridge University Press.

Yambeyapdi, Ester. 2019. "Papua: Sejarah Integrasi yang Diingat dan Ingatan Kolektif", *Indonesian Historical Studies,* 2 (2): 89-95, https://doi.org/10.14710/ihis.v2i2.3749.

Zaller, John R. 1992. *The Nature and Origins of Mass Opinion.* Cambridge: Cambridge University Press.

PENULIS

Prof. Dr. KH. Imam Ghazali Said, M.A.

Kelahiran Sampang, 12 Februari 1960. Guru Besar Sejarah dan Hukum Islam di UIN Sunan Ampel Surabaya. Pengasuh Pesantren Mahasiswa An-Nur Surabaya. Email: imamghazalisaid@gmail.com.

Dr. Nyong Eka Teguh Iman Santosa, M.Fil.I.

Kelahiran Sidoarjo, 22 Desember 1976. Dosen di Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Sunan Ampel Surabaya. Email: nyongeka@uinsby.ac.id.

Dr. Achmad Zuhdi DH, M.Fil.I.

Kelahiran Lamongan, 11 Oktober 1961. Dosen di Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Sunan Ampel Surabaya. Email: zuhdidh@gmail.com.

Di tengah proses menyambut kontestasi politik 2024 yang menghangat, terdapat isu strategis nasional yang masih membayangi perhelatannya. Yaitu ancaman menurunnya tingkat kepercayaan publik pada hasil penyelenggaraan pemilu serta signifikansinya bagi pengembangan demokrasi yang lebih berkeadaban di Indonesia. Salah satu alasan aktual yang bisa dikemukakan adalah fenomena anomali yang muncul pasca pilpres 2019 lalu. Kebiasaan yang terjadi, lawan politik yang kalah memilih untuk berada di luar kekuasaan. Kalaupun terbangun koalisi atau kerjasama politik, sebatas pada kelembagaan partai. Sementara kandidat yang bertarung tidak masuk dalam struktur kekuasaan. Tetapi yang terjadi dalam Pilpres 2019, pasangan kandidat yang kalah justru masuk dalam kabinet, menjadi menteri dari pasangan calon yang terpilih. Prabowo Subianto – Sandiago Uno bergabung dengan koalisi pemerintah menjadi menteri, pembantu Jokowi – Ma'ruf Amin. Dalam sejarah politik Indonesia modern bahkan dunia, peristiwa ini merupakan catatan sejarah baru.